

**RESPONSIVITAS PEMERINTAH PAKPAK BHARAT DALAM  
MENGENDALIKAN HARGA JUAL GAMBIR  
(Studi Penguatan Ekonomi Petani Gambir di Kecamatan Sitellu  
Tali Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat)**

**SKRIPSI**



**universitas  
MALIKUSSALEH**

**Oleh:**

**MAYULINA TINAMBUN  
190210072**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH  
LHOKSEUMAWE  
2023**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, dan karunia serta hidayah- Nya kepada penulis berupa kesehatan, kekuatan serta ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “ **Responsivitas Pemerintah Pakpak Bharat Dalam Mengendalikan Harga Jual Gambir (*Studi Penguatan Ekonomi Petani Gambir di Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat*)**”. Skripsi ini penulis buat untuk memenuhi sebagai gelar sarjana. Semoga skripsi ini bermanfaat kepada penulis secara pribadi dan kepada mahasiswa umumnya. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menghadapi berbagai macam halangan dan rintangan, namun penulisan skripsi ini dapat penulis selesaikan berkat bantuan dan bimbingan dengan penuh ketulusan dan keikhlasan dari berbagai pihak.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini terdapat banyak kekurangan dan sangat mengharap kritik dan saran yang bersifat membangun kearah perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan semoga amal baik yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT.

Bukit Indah, 22 Januari 2024  
Penulis,

**Mayulina Tinambun**  
**NIM : 190210072**

## UCAPAN TERIMAKASIH

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada keluarga tercinta, penghormatan dan kasih sayang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis, yakni **Ayahanda Jonfri Tinambunan dan Ibunda Tati Banurea** tercinta yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan baik materi maupun non materi, sekaligus sebagai support sistem untuk penulis . Terimakasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Herman Fitrah, S.T., M.T., IPM., ASEAN Eng. sebagai Rektor Universitas Malikussaleh.
2. Bapak Dr . M. Nazaruddin, S.Sos., M.Si., sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh.
3. Ibu Dr. Nurhafni, S.Sos., MPA., sebagai Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh sekaligus sebagai Dosen Penguji Pertama penulis yang telah memberikan banyak masukan kepada penulis.
4. Ibu Murniati, S.Sos., MSP sebagai Sekretaris Jurusan Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh.
5. Bapak Dr. Muhammad Hasyem, S.Sos., MSP., sebagai Ketua Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh.
6. Ibu Dr. Cut Sukmawati, SE., M.Si sebagai Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

7. Bapak Bobby Rahman, S.Sos., M.Si sebagai Dosen Penguji Kedua penulis yang telah memberikan banyak masukan kepada penulis.
8. Bapak Dr. Muryali, S.Sos., M.AP sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu dan membimbing penulis selama perkuliahan.
9. Seluruh Dosen Dan Staff pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh, khususnya Prodi Administrasi Publik.
10. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Saudara Kandung Peneliti **Rahmat Zeki Tinambunan, Syahidul Tinambunan, Syamsul Tinambunan, Hasyim Tinambunan** yang selalu mendoakan dan terus memberikan semangat sekaligus sebagai support sistem penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini.
11. Teruntuk pemilik NIM 190130033 terima kasih telah kebersamai penulis dihari-hari yang tidak mudah selama proses penyelesaian skripsi ini. Terima kasih telah meluangkan baik waktu, tenaga, pikiran, materi maupun moril kepada penulis dan senantiasa sabar menghadapi penulis.
12. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada sahabat: Rini Anjlina Banurea, Nurbaini Nasution, Rika Padang, Yasni Bancin, Dheilla Sulnia Lubis, Maisarah Lubis, Silfia Tumangger, Mauliza, Uli Arta Manullang, Fahira Rizki Riszal yang telah menyemangati, dan memberikan masukan-masukan kepada penulis serta sebagai pendengar dan penghibur yang baik bagi penulis.

13. Rekan mahasiswa dan sahabat seperjuangan angkatan 2019 yang telah banyak memberikan dorongan dan motivasi kepada penulis untuk dapat menyelesaikan Skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga Skripsi ini membawa manfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.

Bukit Indah, 22 Januari 2024  
Penulis,

**Mayulina Tinambun**  
**NIM : 190210072**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>UCAPAN TERIMAKASIH</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian .....	9
1.4 Fokus Penelitian.....	9
1.5 Manfaat Penelitian .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>11</b>
2.1 Penelitian Terdahulu .....	11
2.2 Landasan Teoritis.....	15
2.2.1 Konsep Administrasi Publik .....	15
2.2.2 Konsep Pelayanan Publik.....	18
2.2.3 Indikator Pelayanan Publik .....	19
2.2.4 Konsep Responsivitas .....	21
2.2.5 Indikator Responsivitas .....	23
2.2.6 Tujuan dan Manfaat Responsivitas .....	23
2.2.7 Responsivitas Pelayanan Publik.....	24
2.3 Pengertian Pemerintah .....	24
2.3.1 Tugas dan Fungsi Pemerintah.....	27
2.3.2 Intervensi Harga Oleh Pemerintah .....	28
2.4 Gambir .....	31
2.5 Kerangka Konseptual.....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>35</b>
3.1 Lokasi Penelitian.....	35
3.2 Pendekatan Penelitian .....	35
3.3 Informan Penelitian.....	36
3.4 Sumber Data .....	37
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	38
3.6 Teknik Analisis Data .....	40
3.7 Jadwal Penelitian .....	42

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>43</b>
4.1. Hasil Penelitian .....	43
4.1.1 Profil Kabupaten Pakpak Bharat .....	43
4.1.2 Deskripsi Umum Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe.....	45
4.2 Responsivitas Pemerintah Pakpak Bharat dalam Mengendalikan Harga Jual Gambir .....	47
4.2.1 Kemampuan Mengenal Kebutuhan Petani Gambir .....	47
4.2.2 Menyusun Agenda dan Prioritas Pelayanan Sesuai Kebutuhan Dan Aspirasi Petani Gambir .....	53
4.2.3 Keselarasan Program Dan kegiatan Pelayanan Dengan Kebutuhan dan Aspirasi Petani Gambir .....	57
4.2.4 Hambatan Yang di Alami Pemerintah Pakpak Bharat Dalam Mengendalikan Harga Jual Gambir.....	61
 <b>BAB V PENUTUP.....</b>	 <b>64</b>
5.1 Kesimpulan .....	64
5.2 Saran .....	64

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Penggunaan lahan gambir berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2017-2021 .....	4
Tabel 1.2	Perkembangan produksi gambir berdasarkan kecamatan di Pakpak Bharat tahun 2017-2021 .....	5
Tabel 1.3	Jumlah harga gambir di Kecamatan Sitelu Tali Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat 2022 .....	6
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu .....	12
Tabel 3.1	Daftar Informan Peneliti .....	34
Tabel 3.2	Jadwal Penelitian.....	39
Tabel 4.1	Kependudukan Kabupaten Pakpak Bharat 2020.....	41

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Gambir.....	4
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual .....	32
Gambar 4.1 Peta Administratif Kabupaten Pakpak Bharat .....	41

## ABSTRAK

Masyarakat Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe mayoritasnya berprofesi sebagai petani, khususnya petani gambir. Walaupun hasil pertaniannya banyak tetapi harga gambir yang cukup rendah dan kadang tidak stabil dibandingkan dengan harga bahan pokok yang cukup tinggi. Penelitian ini berfokus pada Responsivitas Pemerintah Pakpak Bharat Dalam Mengendalikan Harga Jual Gambir (Studi Penguatan Ekonomi Petani Gambir di Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat). Teori yang digunakan ialah teori Dwiyanto 2002:60 responsivitas merupakan kemampuan organisasi pemerintahan untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Sehingga dapat dikatakan terdapat keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.. Secara umum penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun permasalahan yang diteliti pada penelitian ini adalah bagaimana Responsivitas Pemerintah dalam mengendalikan harga jual gambir di Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe serta hambatan yang dihadapi Pemerintah Pakpak Bharat dalam mengendalikan harga jual gambir di Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe. Hasil penelitian ini yaitu Responsivitas pemerintah dalam mengenali kebutuhan masyarakat untuk mengendalikan harga jual gambir sudah ada tetapi dari segi pelayanannya masih kurang, namun pemerintah sedang berupaya untuk menangani permasalahan harga gambir. Pemerintah tidak hanya berupaya dalam memberikan sosialisasi mengenai cara panen, merawat gambir dengan baik, memproduksi getah gambir yang berkualitas bagus sehingga harga menjadi stabil agar dapat tercapai program kesejahteraan masyarakat, akan tetapi pemerintah juga memberikan beberapa bantuan sarana prasarana kepada petani. Dinas juga telah membukakan informasi-informasi kepada masyarakat petani gambir mengenai harga gambir dan membantu petani untuk memasarkan gambir melalui media sosial. Dinas juga sedang berupaya melakukan program pembuatan label halal dan membuat label produk. Pemerintah juga akan mendaftarkan produk gambir Pakpak Bharat ke HKI (Hak Kekayaan Intelektual) agar produk gambir dari Kabupaten Pakpak Bharat mempunyai hak paten. Hambatan yang dialami yaitu rendahnya pemahaman SDM terkait produksi gambir yang baik, perubahan pola pikir petani dan peningkatan partisipasi masih kurang untuk perkembangan ekonomi, harga gambir di tentukan oleh tengkulak dan keterbatasan dana untuk bantuan teknologi menjadi hambatan dalam menyediakan alat pengolahan gambir kepada petani secara merata sehingga pelayanan yang di berikan belum maksimal terhadap masyarakat petani gambir.

*Kata Kunci: Harga Gambir, Responsivitas*

## **ABSTRACT**

*The majority of the people of Sitellu Tali Urang Jehe District work as farmers, especially gambier farmers. Even though there are a lot of agricultural products, the price of gambier is quite low and sometimes unstable compared to the price of basic commodities which is quite high. This research focuses on the Responsiveness of the Pakpak Bharat Government in Controlling the Selling Price of Gambir (Study of Economic Strengthening of Gambir Farmers in Sitellu Tali Urang Jehe District, Pakpak Bharat Regency). The theory used is the theory of Dwiyanto 2002: 60. Responsiveness is the ability of government organizations to recognize community needs, set agendas and service priorities in accordance with community needs and aspirations. So it can be said that there is harmony between programs and service activities and the needs and aspirations of the community. In general, this research uses descriptive qualitative research methods. The data collection techniques used were observation, interviews and documentation. The problems examined in this research are the government's responsiveness in controlling the selling price of gambier in Sitellu Tali Urang Jehe District and the obstacles faced by the Pakpak Bharat Government in controlling the selling price of gambier in Sitellu Tali Urang Jehe District. The results of this research are that the government's responsiveness in recognizing the community's need to control the selling price of gambier already exists but in terms of service it is still lacking, however the government is trying to address the problem of gambier prices. The government is not only trying to provide outreach on how to harvest, care for gambier well, produce good quality gambier sap so that prices are stable so that community welfare programs can be achieved, but the government also provides several infrastructure assistance to farmers. The Department has also provided information to the gambier farming community regarding gambier prices and helped farmers to market gambier through social media. The Department is also trying to carry out a program for making halal labels and making product labels. The government will also register Pakpak Bharat gambier products with HKI (Intellectual Property Rights) so that gambier products from Pakpak Bharat Regency have patent rights. The obstacles experienced are the low understanding of human resources regarding good gambier production, changes in farmers' mindsets and increasing participation which is still insufficient for economic development, the price of gambier is determined by middlemen and limited funds for technological assistance are obstacles in providing gambier processing equipment to farmers evenly so that The services provided are not optimal for the Gambir farming community.*

*Keywords: Gambir Price, Responsiveness*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Responsivitas merupakan kemampuan organisasi pemerintahan untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, sehingga dapat dikatakan terdapat keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat menurut Dwiyanto 2002:60 (dalam Nawi 2017:19). Sederhananya dapat dikatakan bahwa responsivitas mengukur daya tanggap birokrasi terhadap harapan, keinginan, dan aspirasi tuntutan masyarakat.

Sektor pertanian merupakan sektor yang menjadi dominan dalam menyerap tenaga kerja, khususnya pada sub sektor perkebunan. Pembangunan pada sektor pertanian perlu dikelola dengan baik sehingga hasil yang diperoleh akan lebih berdaya guna dan tepat guna, menghasilkan produktifitas hasil pertanian yang lebih optimal dan memberikan kontribusi yang baik bagi petani dan masyarakat lainnya. Pembangunan pertanian merupakan kegiatan atau upaya yang dilakukan untuk mengelola sumber daya alam yang dilakukan antara pemerintah sebagai pemangku kebijakan dan mendorong dalam hal ini pembangunan pertanian. Para petani sebagai pelaku utama dilapangan dalam pembangunan pertanian dapat juga dikatakan sebagai membangun ekonomi disektor pertanian, karena pertanian merupakan salah satu sektor dalam kehidupan ekonomi. Pertanian adalah usaha manusia melalui kehidupan hewan untuk dapat lebih baik memenuhi kebutuhannya, suatu usaha ekonomi (Bintoro, 2015).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dalam hal ini terdapat pada bab IV pasal 12 ayat 1 dan 2 yang menjelaskan strategi perlindungan dan pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani yang ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, ayat (2) dengan melibatkan pemangku kepentingan dibidang pertanian. Strategi perlindungan pertanian dilakukan melalui: a. memperoleh prasarana dan sarana produksi pertanian; b. kepastian usaha; c. harga komoditas yang menguntungkan petani; d. penghapusan praktik-praktik ekonomi biaya tinggi; e. ganti rugi akibat gagal panen; f. pengutamakan hasil pertanian dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional; g. pemasaran hasil pertanian; h. asuransi pertanian; i. penghasilan karena program pemerintah; j. jaminan sosial nasional. Ayat (3) strategi pemberdayaan pertanian dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, penyuluhan, penguatan kelembagaan petani, pemberian fasilitas sumber pembiayaan/permodalan, pemberian bantuan kredit kepemilikan laba, pemberian fasilitas untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, dan pembentukan bank pertanian/lembaga keuangan pertanian bukan bank.

Undang-undang diatas mengutamakan kesejahteraan dan perlindungan pemberdayaan petani, disini pemerintah berkewajiban menciptakan kondisi yang menghasilkan harga komoditas pertanian yang tinggi atau menguntungkan bagi petani. Mengenai apa yang dibutuhkan dan berharap pemerintah bisa membuat

kebijakan dalam membantu jalannya mata pencarian sehingga melalui potensi yang dimiliki khususnya pada harga jual gambir di Kabupaten Pakpak Bharat yang akan memberikan peningkatan bagi perekonomian masyarakat.

Kabupaten di Sumatera Utara yaitu Kabupaten Pakpak Bharat adalah subsektor perkebunan yang bermacam-macam seperti; gambir, karet, kopi, kemenyan, kayu manis dan lain sebagainya. Produksi tanaman gambir yang dipasarkan berupa getah gambir kering untuk pasar domestik dan pasar ekspor. Tanaman Gambir merupakan sebangsa kopi-kopian (*Famili Rubiace*). Tanaman gambir merupakan produk khusus lokasi dan unggulan di Kabupaten Pakpak Bharat. Gambir adalah salah satu mata pencaharian untuk meningkatkan pendapatan para petani. Produk dari tanaman gambir adalah getahnya yang diperoleh dari ekstrak daun dan ranting muda yang terlebih dahulu direbus dan terakhir dikeringkan. Tanaman gambir ini dapat dikatakan tanaman serba guna, karena selain sebagai bahan untuk makan sirih, juga berguna dalam berbagai jenis industri, seperti industri tekstil (pewarna batik), kosmetik, obat-obatan, bahan baku dupa dan lain-lain. Selain manfaatnya yang banyak tanaman gambir ini juga dapat dikelola ditempat datar maupun perbukitan cara perawatannya pun tidak memakan banyak biaya dan mutu gambir yang dihasilkan lebih tinggi mampu mencapai 90% dari berat getahnya.

Kualitas dari gambir biasanya ditentukan pada saat pengolahan. Umumnya petani menggunakan alat pengolahan sederhana, berupa kapitan (kempa) yang terbuat dari dua bilah kayu besar berbentuk huruf V dan masing-masing petani memodifikasi. Pengolahan gambir melalui tahapan antara lain : pengambilan daun

gambir, pemetikan daun gambir, perebusan daun gambir, pengempaan (pengkapitan), pengendapan, penirisan, pencetakan, dan pengeringan getah gambir.

**Gambar 1.1 Gambir**



Sumber: <http://pakpakbharat.go.id>

Luas penggunaan lahan gambir dan perkembangan produksi gambir pada Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat pada tahun 2018-2022 data dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.1**  
**Penggunaan Lahan Gambir berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2018-2022**

No	Kecamatan	Luas lahan (ha)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Salak	144	149	147	125	125
2	Sitellu Tali Urang Jehe	<b>656</b>	<b>649</b>	<b>646</b>	<b>450</b>	<b>450</b>
3	Pagindar	25	24,6	32	21	21
4	Sitellu Tali Urang Julu	8	8	8	9	9
5	Pergetteng Geteng Sengkut	217	220	216	306	306
6	Kerajaan	60	61	61	46,5	46,5
7	Tinada	28	27,4	26	49	49
8	Siempat Rube	13	12	12	12	12
<b>Pakpak Bharat</b>		<b>1.151,00</b>	<b>1.151</b>	<b>1.148,00</b>	<b>1.08,50</b>	<b>1.018,50</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Pakpak Bharat 2018-2022

Tabel diatas menunjukkan jumlah luas penggunaan lahan gambir tidak sesuai yang diharapkan dimana jumlah perkembangan luas lahan tidak menentu dan mengalami penurunan. Luas lahan gambir tertinggi dari 8 (delapan) Kecamatan di Kabupaten Pakpak Bharat adalah Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe, pada tahun 2018 luas penggunaan lahan yaitu 656 Ha, di tahun 2019 penggunaan lahan gambir mengalami penurunan 649 Ha dan tahun 2020 luas penggunaan lahan gambir berjumlah 646 Ha. Pada tahun 2021 dan 2022 mengalami penurunan yang sangat drastis dimana luas penggunaan lahan yaitu 450 Ha.

**Tabel 1.2**  
**Perkembangan produksi gambir berdasarkan kecamatan di Pakpak Bharat tahun 2018-2022**

No	Kecamatan	Produksi (ton)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Salak	60	61	61	130.00	130
2	Sitellu Tali Urang Jehe	<b>972</b>	<b>968,2</b>	<b>968,2</b>	<b>850.00</b>	<b>850</b>
3	Pagindar	12	12,4	12,4	5.00	5
4	Sitellu Tali Urang Julu	3	3	3	4.00	4
5	Pergetteng Geteng Sengkut	12	12	12	260.00	260
6	Kerajaan	22	23,4	44,4	120.00	120
7	Tinada	24	25	25	40.00	40
8	Siempat Rube	2	2	2	7.00	7
<b>Jumlah</b>		<b>1.107,00</b>	<b>1.107,00</b>	<b>1.128,00</b>	<b>1.416,00</b>	<b>1.416,00</b>

*Sumber: Badan Pusat Statistik Pakpak Bharat 2021*

Tabel diatas menjelaskan bahwa perkembangan produksi gambir di Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat pada tahun 2018 jumlah produksi sebesar 972 ton, pada tahun 2019 jumlah produksi mengalami sedikit penurunan yaitu 968,2 ton dan pada tahun 2020 produksi sebesar 968,2 ton. Namun pada tahun berikutnya jumlah produksi gambir mengalami penurunan

drastis, yaitu pada tahun 2021 jumlah produksi 850,00 ton dan pada tahun 2022 jumlah produksi gambir yaitu 850 ton.

Harga gambir Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat data dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.3 Jumlah harga gambir di Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat 2023**

No	Harga /Unit	Harga/ Kg	Keterangan
1	Rp.2.500./pcs	Rp.90.000./kg	Harga Pemerintah
2	Rp.2.000./pcs	Rp.60.000./kg	Harga Pengepul

*Sumber: Observasi awal*

Peraturan Bupati Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 35 tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan yang berlaku pada tahun 2022 di Kabupaten Pakpak Bharat, harga stabil gambir yang diberikan pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat kepada masyarakat tahun 2022 berkisaran Rp.90.000/kg. Sedangkan harga penjualan masyarakat kepada tengkulak adalah berkisar Rp.60.000/kg. Pada akhir tahun 2018 dan awal 2019 harga gambir sempat naik berkisaran Rp.90.000/kg menjual kepada tengkulak. Masyarakat biasanya dapat menghasilkan gambir 2kg-3kg dalam dua kali pengolahan dalam dua hari. Rata-rata pendapatan petani gambir dalam sebulan pada saat harga naik adalah sebesar Rp.5.400.000. Pada tahun 2020 hingga tahun 2021 harga gambir mulai kembali menurun, rata-rata pendapatan petani gambir dalam sebulan pada saat harga turun adalah berkisar Rp.2.070.000. Petani gambir menjual ke tengkulak dengan harga Rp.23.000/kg.

Harga jual juga sangat mempengaruhi pendapatan masyarakat Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe, petani gambir menyatakan harga jual yang mereka terima berbeda. Perbedaan ini belum diketahui oleh pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat, karena harga yang diberikan oleh pengepul berbeda

dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah, pemerintah mempunyai kewenangan untuk mengestabilkan harga yang sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2021. Pemerintah sebagai pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi meliputi usaha mengatur dan mengawasi aktivitas ekonomi, baik yang dilakukan rumah tangga maupun perusahaan. Hal ini dilakukan agar para pelaku ekonomi lainnya melakukan aktivitas ekonomi secara wajar dan tidak merugikan masyarakat banyak. Dalam aktivitas ekonomi, pemerintah termasuk sebagai pelaku karena bertanggung jawab sebagai pengawas dan pengatur. Rangsangan ekonomi dalam bentuk tingkat harga yang menguntungkan merupakan faktor paling penting bagi petani untuk meningkatkan produksinya, juga berlaku bagi setiap produsen dan di sektor-sektor lain.

Petani pada akhirnya akan merasa tidak ada untungnya memperluas lahan garapan, menerapkan teknologi baru, memakai pupuk berkualitas baik tetapi dengan harga mahal dari pada pupuk organik, dan melakukan pengembangan produksi apabila semua itu tidak menambah penghasilan netonya. Karena harga merupakan faktor utama, maka pemerintah harus mengetahui betul bagaimana respons penawaran/suplai di sektor pertanian terhadap perubahan harga. Sehingga dapat dilihat dan dirasakan pemerintah masih kurang peka terhadap perekonomian petani gambir. Permasalahan yang terjadi di dalam harga jual gambir yang kerap sekali tidak stabil karena peran dari pemerintah yang kurang efektif memberikan pemahaman atau kurangnya menjalankan kewenangan. Pemerintah yang tidak memberikan bantuan kepada petani gambir atau hanya memberikan bantuan kepada petani gambir tertentu saja, bantuan yang tidak merata sehingga banyak

petani gambir yang melakukan kecurangan atau mengelola gambir dengan cara yang tidak baik, sehingga banyak tengkulak yang merasa dirugikan dan tengkulak tidak berani memberikan harga yang tinggi dikarenakan kecurangan yang dilakukan oleh petani gambir, maka dari itu perlunya peran dari pemerintah atau dinas pertanian untuk memberikan pemerdayaan kepada petani gambir agar menghasilkan harga jual yang tinggi dan harga yang stabil.

Penelitian awal peneliti didapat harga gambir di Kabupaten Pakpak Bharat diharapkan akan membaik dengan adanya kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap petani gambir, menyangkut tentang peranan pemerintah daerah dalam mengendalikan harga jual gambir untuk penguatan ekonomi petani gambir di Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat. Namun berdasarkan pengamatan peneliti, kondisi tersebut tidak sesuai dengan kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Responsivitas Pemerintah dalam mengendalikan harga jual gambir di Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat?
2. Apa hambatan yang dihadapi Pemerintah Pakpak Bharat dalam mengendalikan harga jual gambir di Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Seiring dengan permasalahan yang telah disebutkan di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Responsivitas Pemerintah dalam mengendalikan harga jual gambir di Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi Pemerintah Pakpak Bharat dalam mengendalikan harga jual gambir di Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat.

### **1.4 Fokus Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, yang menjadi fokus penelitian ini adalah:

1. Responsivitas Pemerintah, aspek yang dikaji terkait kemampuan birokrasi dalam mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, mengembangkan program pelayanan sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
2. Hambatan yang dihadapi Pemerintah Pakpak Bharat dalam mengendalikan harga jual gambir aspek yang dikaji terkait masalah yang dihadapi pemerintah dalam mengendalikan atau menstabilkan harga gambir.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini dapat ditinjau dari dua aspek, yakni manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis:

1. Manfaat teoritis

- a. Dari hasil penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan sumbangan bagi penelitian-penelitian selanjutnya dan bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Administrasi Publik.
- b. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan acuan bagi penelitian selanjutnya terkait dengan Responsivitas Pemerintah.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi pemerintah daerah diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan dan pedoman bagaimana responsivitas pemerintah dalam mengendalikan harga jual gambir pada penguatan ekonomi petani gambir demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani gambir.
- b. Bagi peneliti diharapkan hasil penelitian ini mampu menambah wawasan serta pengalaman sebagai seorang peneliti.
- c. Sebagai tambahan bahan pedoman dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan petani gambir di Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan salah satu acuan dalam melakukan penelitian ini sehingga dapat memperbanyak teori yang digunakan dalam melaksanakan penelitian yang dilakukan. Penulis mengangkat beberapa peneliti sebagai referensi untuk memperkaya bahan kajian dalam penelitian ini Adapun beberapa peneliti terdahulu yaitu sebagai berikut:

**Tabel. 2.1 Penelitian Terdahulu**

No	Nama	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Yuni Evalisah (2020)	Skripsi Responsivitas Pemerintah Daerah Dalam Ketahanan Pangan.	Kualitatif Deskriptif	Hasil penelitian ini menunjukkan Responsivitas pemerintah dalam pengembangan meningkatkan produksi padi untuk mencukupi kebutuhan beras dalam daerah sudah dilakukan namun belum maksimal sehingga masih menggunakan beras dari daerah luar. Terdapat pengalihan fungsi lahan pertanian menjadi lahan nonpertanian mengalami peningkatan, tidak ada upaya secara serius pembangunan koperasi- koperasi dan UKM dalam Produksi,	Sama-sama meneliti responsivitas pemerintah dengan metode kualitatif	Penelitian ini memfokuskan tentang bagaimana responsivitas pemerintah dalam pengembangan meningkatkan ketahanan pangan.

				distribusi, dan konsumsi disektor pangan oleh gampong.		
2	Siska Wani (2019)	Skripsi Responsivitas Pemerintah Daerah Dalam Menstabilkan Harga Karet Untuk Kesejahteraan Petani Karet.	Kualitatif Deskriptif	Responsivitas yang diberikan pemerintah daerah mengenai kebutuhan masyarakat dapat berupa barang dan jasa. Dalam bentuk jasa pemerintah daerah telah memberikan saran maupun solusi melalui sosialisasi, dalam bentuk barang pemerintah daerah telah memberikan bantuan secara bertahap kepada petani karet pada tahun 2015 dan 2017. Dalam mengembangkan pelayanan pemerintah daerah memberikan solusi mengenai cara menyadap dan merawat karet dengan baik agar dapat tercapai program kesejahteraan masyarakat.	Sama-sama meneliti responsivitas pemerintah dengan metode kualitatif	Peneliti melakukan penelitian Di Kabupaten Aceh Timur sedangkan Peneliti di Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe. Yang menjadi pembeda selanjutnya ialah penelitian ini membahas Responsivitas Pemerintah Daerah Dalam Menstabilkan Harga Karet Untuk Kesejahteraan Petani Karet.
3	Yuliana (2019)	Skripsi Strategi Pemerintah Kabupaten Simeulue Dalam Pemberdayaan Ekonomi	Kualitatif Deskriptif	Strategi pemerintah kabupaten simeulue dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir melalui	Sama-sama membahas tentang strategi pemerintah dalam memberdayakan	Peneliti ini melakukan penelitian Di Kabupaten Simeulue lebih memfokuskan pada kajian Strategi

		Masyarakat Pesisir Melalui Wisata Pantai.		wisata pantai merupakan salah satu cara mengatasi kemiskinan yang ada pada masyarakat pesisir gampong labuhan bakti. Adapun strategi pemerintah kabupaten simeulue dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir ialah dengan cara pemberian tambahan modal kepada masyarakat, memberikan pelatihan-pelatihan, meningkatkan beberapa akses kepada masyarakat agar masyarakat lebih mudah mendapatkan berbagai informasi yang mereka perlukan.	masyarakat serta upaya peningkatan ekonomi masyarakat, menggunakan pendekatan kualitatif.	Pemerintah Kabupaten Simeulue Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Melalui Wisata Pantai.
4	Nopita Sari Berutu (2021)	Skripsi Strategi Pemerintah Daerah Dalam Mengelola Tanaman Gambir Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Nanjombal (Mbinangun) Kabupaten	Kualitatif Deskriptif	Strategi dalam Upaya Pemberdayaan pengolahan tanaman gambir meningkatkan kesejahteraan masyarakat diantaranya ialah pemerintah daerah sendiri sudah melakukan berbagai pendekatan	Sama-sama membahas tentang gambir dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan metode kualitatif	Penelitian ini melakukan penelitian di Desa Nanjombal (Mbinangun), mengkaji tentang Strategi Pemerintah Daerah Dalam Mengelola Tanaman Gambir Untuk Meningkatkan

		Pakpak Bharat		edukasi kepada masyarakat khususnya petani gambir dalam hal pengolahan tanaman gambir. Di Desa Nanjombal Kabupaten Pakpak Bharat saat ini perlu diperhatikan pemerintah daerah dalam upaya pemberdayaan, perlu melakukan sosialisasi dan pendekatan dalam upaya memberikan pemahaman kepada masyarakat.		Kesejahteraan Masyarakat.
5	Haidul Tinendung (2017)	Skripsi Kehidupan Sosial Ekonomi Petani Gambir Di Desa Tanjung Mulia Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat.	Kualitatif Deskriptif	Kehidupan sosial ekonomi petani gambir di Desa Tanjung Mulia Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat Dapat dikategorikan Sejahtera karena Tingkat kemiskinan petani gambirnya hanya 16%. Meskipun terdapat beberapa petani gambir yang dikategorikan masih miskin, namun hal tersebut disebabkan	Sama sama menyangkut kepada masyarakat petani gambir, persamaan selanjutnya adalah lokasi penelitian yang dilakukan peneliti bertempat di Kabupaten Pakpak Bharat Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe.	Peneliti melakukan penelitian Di Desa Tanjung Mulia sedangkan Peneliti di Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe. Yang menjadi pembeda selanjutnya ialah penelitian ini membahas Kehidupan Sosial Ekonomi Petani Gambir.

				<p>karena kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan yang dapat mempengaruhi pola pikir petani tersebut, kurangnya lahan yang tersedia, dan minimnya peranan Pemerintah setempat dalam memberikan perhatian terhadap petani gambir.</p>		
--	--	--	--	---	--	--

Sumber: Hasil Observasi

## 2.2 Landasan Teoritis

### 2.2.1 Konsep Administrasi Publik

Menurut Chandler dan Plano dalam Harbani Pasolong (2010 :7) Administrasi publik adalah proses dimana sumber daya personal publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (*manage*) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik.

Menurut Harbani Pasolong (2010:8) administrasi publik adalah kerja sama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan publik secara efisien dan efektif.

Menurut Nicholas dalam Harbani Pasolong (2010 :8) Administrasi P ublik adalah suatu kombinasi suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktek, dengan tujuan mempromosi pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan dengan masyarakat yang diperintah, dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih *responsive* terhadap kebutuhan sosial.

Administrasi publik, menurut Chandler dan Plano dalam Keban (2008 : 4) adalah proses dimana sumberdaya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (*manage*) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Sedangkan Keban menyatakan bahwa istilah Administrasi Publik menunjukkan bagaimana pemerintah berperan sebagai agen tunggal yang berkuasa atau sebagai regulator, yang aktif dan selalu berinisiatif dalam mengatur atau mengambil langkah dan prakarsa, yang menurut mereka penting atau baik untuk masyarakat karena diasumsikan bahwa masyarakat adalah pihak yang pasif, kurang mampu, dan harus tunduk dan menerima apa saja yang diatur pemerintah (Keban, 2008: 4)

Menurut Gray dalam Harbani Pasolong (2010:18) yakni peran Adiminstrasi Publik dalam masyarakat sebagai berikut :

1. Administrasi Publik berperan menjamin pemerataan distribusi pendapatan nasional kepada kelompok masyarakat miskin secara berkeadilan.
2. Adimistasi Publik melindungi hak- hak masyarakat atas pemilikan kekayaan, serta menjamin kebebasan bagi masyarakat yang melaksanakan tanggung jawab atas diri mereka sendiri dalam bidang keehatan, pendidikan dan pelayanan bagi kelompok masyarakat lanjut usia.

Sedangkan Herbert Simon dalam Pasolong (2010:14) membagi empat prinsip administrasi yang lebih umum yaitu :

1. Efisiensi administrasi dapat ditingkatkan melalui spesialisasi tugas di kalangan kelompok.

2. Efisiensi administrasi ditingkatkan dengan anggota kelompok dalam suatu hirarki yang pasti
3. Efisiensi administrasi dapat ditingkatkan dengan membatasi jarak pengawasan pada setiap sektor di dalam organisasi sehingga jumlahnya menjadi kecil.
4. Efisiensi administrasi ditingkatkan dengan mengelompokkan pekerjaan, untuk maksud-maksud pengawasan berdasarkan tujuan, proses, langganan, tempat.

Menurut Stephen P. Robbins, teori administrasi dalam Harbani Pasolong 2010:17 meliputi :

1. Teori Hubungan Manusia. Teori ini dirintis oleh Elton Mayo. Pengembangan Teori Mayo didasarkan pada penemuannya selama memimpin proyek. Mayo bermaksud menguji hubungan antara produktivitas dengan lingkungan fisik. Mayo menangkap bahwa norma-norma sosial, justru merupakan faktor kunci dalam perilaku kerja individual. Karenanya, rangsangan kenaikan upah tidak memacu pekerja untuk bekerja lebih produktif.
2. Teori Pengambilan Keputusan. Dalam pengambilan keputusan para pemikir menyarankan dipergunakannya statistik, model optimasi, model informasi, dan simulasi. Di samping itu dapat juga dimanfaatkan pengetahuan-pengetahuan yang berasal dari *linear programming*, *critical path scheduling*, *inventory models*, *site location models*, serta berbagai bentuk *resource allocation models*.

3. Teori Perilaku. Teori ini bermaksud untuk menintegrasikan semua pengetahuan mengenai anggota organisasi, struktur dan prosesnya. Teori ini memahami pentingnya faktor perilaku manusia sebagai alat utama untuk mencapai tujuan.
4. Teori Sistem. Dalam teori ini, organisasi dipandang sebagai suatu sistem yang menampilkan karakteristiknya sebagai penerima masukan, pengolah dan penghasil.
5. Teori Kontigensi. Pada awalnya teori ini dipergunakan pada pengembangan organisasi yang dirancang secara optimal dapat mengadaptasi teknologi dan lingkungan. Teori kontigensi diangkat untuk mencari beberapa karakteristik umum yang melekat pada situasi khusus.

### **2.2.2 Konsep Pelayanan Publik**

Pelayanan pada dasarnya dapat didefinisikan sebagai aktivitas seseorang, sekelompok dan organisasi baik langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan. Pelayanan berarti melayani suatu jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam segala bidang. Kegiatan pelayanan kepada masyarakat merupakan salah satu tugas dan fungsi administrasi pemerintah.

Pelayanan publik menurut Sinambela (dalam Harbani Pasolong 2013:128) adalah sebagai setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik.

Kurniawan (dalam Harbani Pasolong 2013:128) mengatakan bahwa pelayanan publik adalah pemberian pelayanan (melayani) keperluan orang lain atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.

### **2.2.3 Indikator Pelayanan Publik**

Kualitas pelayanan publik yang diberikan perusahaan tentunya tidaklah hanya bertujuan untuk memberikan kepuasan semata. Menurut Zeithaml hal ini mencakup pada indikator pelayanan dan jasa yang akan dimati diantaranya:

1. Daya Tanggap (*Responsiveness*)

Daya tanggap merupakan suatu respon/kesigapan karyawan dalam membantu konsumen/pelanggan dan memberikan pelayanan yang cepat dan tanggap.

2. Keandalan (*Reliability*)

Keandalan adalah suatu kemampuan untuk memberikan jasa/pelayanan yang dijanjikan, dengan akurat dan terpercaya. Artinya pelayanan yang diberikan harus handal dan bertanggung jawab, serta karyawan harus bersikap sopan dan ramah.

3. Jaminan (*Assurance*)

Jaminan adalah kemampuan karyawan atas pengetahuan terhadap pelayanan secara tepat, kualitas, keramah-tamahan, perkataan atau kesopanan dalam memberikan pelayanan, keterampilan dalam memberikan informasi dan kemampuan dalam menanamkan kepercayaan

konsumen terhadap perusahaan/instansi yang terkait dalam memberikan pelayanan.

4. Perhatian (*Emphaty*)

Sebuah perhatian adalah kemampuan dalam membenkan perhatian yang bersifat individual atau pribadi kepada orang lain.

5. Kemampuan Fisik (*Tangibles*)

Kemampuan fisik adalah suatu bentuk penampilan fisik, peralatan personal, media komunikasi, dan hal-hal yang lainnya yang bersifat fisik (yang tampak/*tangible*).Salah satu catatan penting bagi pelaku pembern layanan, bahwa dalam memberikan pelayanan harus memperhatikan sisi penampilan fisik para karyawan dalam meberikan pelayanan yang santun dan beretika.

Zeithaml dkk dalam Hardiyansyah 2011 dalam buku kualitas pelayanan publik. Kualitas pelayanan dapat diukur dari 5 indikator, yaitu *tangible* (berwujud), *reability* (kehandalan), *responsiveness* (ketanggapan), *assurance* (Jaminan), *empaty* (Empati).

1. *Responsiveness* atau ketanggapan yaitu suatu kemauan untuk membantu dan memberikan pelayanan yang cepat (responsif) dan tepat kepada pelanggan, dengan penyampaian informasi yang jelas.
2. *Reliability*, atau keandalan yaitu kemampuan perusahaan untuk memberikan pelayanan sesuai yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya.

3. *Assurance*, jaminan dan kepastian yaitu pengetahuan, atau kesopansantunan, dan kemampuan para pegawai perusahaan untuk menumbuhkan rasa percaya para pelanggan kepada perusahaan.
4. *Emphaty*, yaitu memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual atau pribadi yang diberikan kepada para pelanggan dengan berupaya memahami keinginan konsumen.
5. *Tangible*, atau bukti fisik yaitu kemampuan suatu perusahaan dalam menunjukkan eksistensinya kepada pihak eksternal. Penampilan dan kemampuan sarana dan prasarana fisik perusahaan dan keadaan lingkungan sekitarnya adalah bukti nyata dari pelayanan yang diberikan oleh pemberi jasa.

Dari penjelasan diatas yang menjadi fokus dari penelitian peneliti yaitu indikator pelayanan berupa responsivitas. Responsivitas juga menjadi salah satu indikator pelayanan berkaitan dengan daya tanggap aparatur terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

#### **2.2.4 Konsep Responsivitas**

Responsivitas juga menjadi salah satu indikator pelayanan berkaitan dengan daya tanggap aparatur terhadap kebutuhan masyarakat yang membutuhkan pelayanan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan. Responsivitas menunjukkan keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan masyarakat. Menurut Dwiyanto dalam Rusdin Nawi 2017:19 Responsivitas merupakan kemampuan organisasi pemerintahan untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan sesuai dengan

kebutuhan dan aspirasi masyarakat, sehingga dapat dikatakan terdapat keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Menurut Widodo dalam Muliawati 2022, mengatakan bahwa pemerintah dapat dikatakan bertanggung jawab jika mereka dinilai mempunyai responsifitas (daya tanggap) yang tinggi terhadap apa yang menjadi permasalahan, kebutuhan, keluhan, dan aspirasi masyarakat yang diwakilinya, mereka cepat memahami apa yang menjadi tuntutan publik dan berusaha semaksimal mungkin memenuhinya, ia dapat menangkap masalah yang dihadapi publik dan berusaha untuk mencari solusinya, mereka tidak suka menunda-nunda waktu, memperpanjang jalur pelayanan, atau mengutamakan prosedur tetapi mengabaikan substansi. Maka dari itu pemerintah dituntut memiliki responsivitas yang tinggi terhadap kebutuhan dan masalah yang timbul dalam masyarakat. Responsivitas ditunjukkan dengan kepekaan dan kemampuan pemerintah dalam menghadapi masalah yang timbul termasuk dalam menangani masalah pasar. Responsivitas merupakan salah satu indikator pelayanan yang berkaitan dengan daya tanggap aparatur negara terhadap suatu kebutuhan masyarakat yang memerlukan pelayanan seperti yang telah diatur dalam perundang-undangan.

Dari beberapa pengertian responsivitas dapat disimpulkan bahwa responsivitas adalah bentuk atau sikap tanggap penyedia layanan atau pemerintah dalam menanggapi dan membantu memberikan pelayanan kepada masyarakatnya. Birokrasi perlu mendekati diri kepada masyarakat untuk mengenali apa saja kebutuhan dan keinginan masyarakat. Maka dari itu pemerintah dituntut untuk

memiliki rasa responsivitas yang tinggi guna memenuhi semua masalah yang ada pada masyarakat.

### **2.2.5 Indikator Responsivitas**

Menurut Zeithami dkk (*dalam Public Administration Journal of Research 2020*) bahwa dalam operasionalnya, responsivitas terbagi menjadi beberapa indikator, yaitu:

1. Merespon setiap pelanggan/pemohon yang ingin mendapatkan pelayanan. Indikator ini mencakup sikap dan komunikasi yang baik dari para penyedia layanan.
2. Petugas/aparatur melakukan pelayanan dengan cepat. Pelayanan dengan cepat ini berkaitan dengan kesigapan dan ketulusan penyedia layanan dalam menjawab pertanyaan dan memenuhi permintaan pelanggan.
3. Petugas/aparatur melakukan pelayanan dengan tepat yaitu tidak terjadi kesalahan dalam melayani, artinya pelayanan yang diberikan sesuai dengan keinginan masyarakat sehingga tidak ada yang merasa dirugikan atas pelayanan yang didapatnya.

### **2.2.6 Tujuan dan Manfaat Responsivitas**

Tujuan responsivitas menurut Dwiyanto 2008:62 (*dalam Setianingrum 2020*) adalah bukti kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakatnya, menyusun agenda dan prioritas pelayanan seriat untuk mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakatnya. Keluhan yang disampaikan masyarakat sebagai pengguna jasa merupakan salah satu indikator yang memperhatikan bahwa produk

pelayanan selama ini yang di terapkan oleh birokrasi, belum dapat memenuhi harapan masyarakatnya. Maka dari itu responsivitas ini sangat diperlukan untuk mengimbangi ketidakpuasan dari masyarakat.

### **2.2.7 Responsivitas Pelayanan Publik**

Responsivitas merupakan pertanggung jawaban dari sisi yang menerima pelayanan atau masyarakat. Seberapa jauh masyarakat melihat penyelenggara pelayanan bersikap tanggap terhadap permasalahan, kebutuhan, dan harapan masyarakat. Responsivitas merupakan kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, serta mengembangkan program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas pelayanan publik sangat diperlukan, karna sebagai bukti kemampuan organisasi publik untuk menyediakan apa yang menjadi tuntutan seluruh rakyat disuatu Negara. Dalam hal ini responsivitas merupakan cara yang efisiensi dalam mengatur urusan baik ditingkat pusat maupun tingkat daerah atau lokal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, karenanya baik pemerintah pusat maupun daerah dikatakan responsive terhadap kebutuhan masyarakat apabila kebutuhan masyarakat tadi diidentifikasi oleh para pembuat kebijakan dengan pengetahuan yang dimiliki, secara tepat dan dapat menjawab apa yang menjadi kepentingan publik, menurut Widodo, 2007:272 (Radiana & Riski Ramadani,2021).

### **2.3 Pengertian Pemerintah**

Pembentukan pemerintah daerah sesuai dengan amanat pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar dari berbagai produk undang-undang dan

peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai Pemerintah Daerah. Tujuan pembentukan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat disamping sebagai sarana pendidikan politik ditingkat lokal.

Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah menjelaskan bahwa yang dimaksud pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam penjelasannya di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah meliputi Gubernur, Bupati, Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan daerah. Berkaitan dengan hal itu peran pemerintah daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan dalam bentuk cara tindak baik dalam rangka melaksanakan otonomi daerah sebagai suatu hak, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Syaukani, dkk (2009:144) menjelaskan prinsip-prinsip pemerintah daerah antara lain:

1. Menunjang aspirasi perjuangan masyarakat.

2. Otonomi yang nyata dan bertanggung jawab.
3. Desentralisasi dilakukan secara bersama-sama dengan asas dekonsentrasi.
4. Mengutamakan aspek keserasian dengan tujuan disamping aspek pendemokrasian.
5. Tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah daerah.

Prinsip-prinsip diatas harus dimiliki oleh setiap pemerintah daerah. Dengan adanya prinsip-prinsip tersebut pemerintah daerah dapat menjalankan atau melaksanakan tugasnya dengan baik. Dan prinsip itu pula pemerintah dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah.

Menurut Syauckani, dkk (2009:145) ada beberapa karekteristik dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, yaitu:

1. Wilayah negara dibagi kedalam daerah besar dan kecil yang bersifat otonomi atau administratif saja.
2. Pemerintah daerah diadakan secara bertingkat.
3. DPRD tinglat I, II dan kotamadya merupakan bagian dari pemerintah daerah.
4. Peranan menteri dalam negeri dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dikatakan bersifat aksesif atau berlebih-lebihan.
5. Undang-undang memberikan tempat yang layak kepada kepala wilayah dari kepala daerah.
6. Keuangan daerah, sebagaimana umumnya dengan undang-undang terdahulu, diatur secara umum saja.

### **2.3.1 Tugas dan Fungsi Pemerintah**

Pemerintah merupakan suatu gejala yang berlangsung dalam kehidupan bermasyarakat yaitu hubungan antara manusia dengan setiap kelompok termasuk dalam keluarga. Masyarakat sebagai suatu gabungan dari sistem sosial, akan senantiasa menyangkut dengan unsur- unsur pemenuhan kebutuhan dasar manusia seperti keselamatan, istirahat, pakaian dan makanan.

Dalam memenuhi kebutuhan dasar itu, manusia perlu bekerja sama dan berkelompok dengan orang lain dan bagi kebutuhan sekunder maka diperlukan bahasa untuk berkomunikasi menurut makna yang disepakati bersama, dan institusi sosial yang berlaku sebagai kontrol dalam aktivitas dan mengembangkan masyarakat. Lahirnya pemerintahan pada awalnya adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban di dalam masyarakat, sehingga masyarakat tersebut bisa menjalankan kehidupan secara wajar. Seiring dengan perkembangan masyarakat modern yang ditandai dengan meningkatnya kebutuhan baik sosial, politik maupun ekonomi, peran pemerintah kemudian berubah menjadi melayani masyarakat. Pemerintah modern, dengan kata lain hakikatnya adalah pelayanan kepada masyarakat.

Pemerintah tidaklah diadakan untuk melayani diri sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi mencapai kemajuan bersama. Pemerintah yang demokratis lahir untuk melayani warganya dan karena itulah tugas pemerintah adalah mencari cara untuk menyenangkan warganya. Dengan demikian lahirnya pemerintahan memberikan pemahaman bahwa

kehadiran suatu pemerintahan merupakan manifestasi dari kehendak masyarakat (Osborne dan Gaebler dalam Rasyid, 2000: 13).

### **2.3.2 Intervensi Harga Oleh Pemerintah**

Harga merupakan suatu nilai tukar yang diperoleh petani berdasarkan harga jual barang yang dihasilkan oleh petani gambir. Harga juga sangat berpengaruh terhadap pendapatan petani gambir. Semakin tinggi harga komoditas yang dijual petani akan meningkatkan pendapatan. Terjadinya penurunan harga gambir otomatis akan mengakibatkan penurunan tingkat pendapatan petani gambir serta mengakibatkan perlambatan pada perekonomian. Pengaruh harga gambir juga akan mendorong peningkatan jam kerja.

Menurut Daniel 2004 Harga merupakan salah satu faktor yang sangat sulit dikendalikan. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah mengenai harga, tetapi sampai saat ini tetap saja harga masih merupakan masalah, malah lebih berkembang lagi yang menjadi masalah besar bagi petani. Secara umum, harga adalah sesuatu yang sangat penting untuk dipertimbangkan oleh pembeli untuk memutuskan atau tidak membeli barang dan jasa yang dibutuhkan.

Menurut (Ekhtarina, 2008) harga merupakan nilai tukar suatu produk yang dinyatakan dalam satuan moneter atau uang. Harga suatu produk merupakan suatu faktor penentuan permintaan pasar pada suatu barang atau produk. Harga berpengaruh terhadap posisi kompetisi perusahaan dan pangsa pasarnya yang disebabkan karena harganya. Untuk menjaga stabilitas harga sehingga tidak menguntungkan sepihak dan merugikan sepihak, peran serta pemerintah sangat diperlukan dalam hal ini.

Untuk mengatasi kegagalan pasar (*market failure*) seperti kekakuan harga, monopoli, dan eksternalitas yang merugikan maka peran pemerintah sangat diperlukan dalam perekonomian suatu negara. Peranan ini dapat dilakukan dalam bentuk intervensi secara langsung maupun tidak langsung. Berikut adalah intervensi pemerintah secara langsung dan tidak langsung dalam penentuan harga pasar untuk melindungi konsumen atau produsen melalui kebijakan penetapan harga minimum (*floor price*) dan kebijakan penetapan harga maksimum (*ceiling price*).

1. Intervensi Pemerintah secara Langsung

- a. Penetapan Harga Minimum (*floor price*), Penetapan harga minimum atau harga dasar yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk melindungi produsen, terutama untuk produk dasar pertanian. Misalnya harga gabah kering terhadap harga pasar yang terlalu rendah. Hal ini dilakukan supaya tidak ada tengkulak (orang/pihak yang membeli dengan harga murah dan dijual kembali dengan harga yang mahal) yang membeli produk tersebut diluar harga yang telah ditetapkan pemerintah. Jika pada harga tersebut tidak ada yang membeli, pemerintah akan membelinya melalui BULOG (Badan Usaha Logistik) kemudian didistribusikan ke pasar. Namun, mekanisme penetapan harga seperti ini sering mendorong munculnya praktik pasar gela, yaitu pasar yang pembentukan harganya di luar harga minimum.

b. Penetapan Harga Maksimum (*ceiling price*), Penetapan harga maksimum atau Harga Eceran Tertinggi (HET) yang dilakukan pemerintah bertujuan untuk melindungi konsumen. Kebijakan HET dilakukan oleh pemerintah jika harga pasar dianggap terlalu tinggi diluar batas daya beli masyarakat (konsumen). Penjual tidak diperbolehkan menetapkan harga diatas harga 26 maksimum tersebut. Contoh penetapan harga maksimum di Indonesia antara lain harga obat-obatan diapotek, harga BBM, dan tariff angkutan atau transportasi seperti tiket bus kota, tarif kereta api dan tarif taksi per kilometer. Seperti halnya penetapan harga minimum, penetapan harga maksimum juga mendorong terjadinya pasar gelap.

## 2. Intervensi Pemerintah secara Tidak Langsung

a. Penetapan pajak, Kebijakan penetapan pajak dilakukan oleh pemerintah dengan cara mengenakan pajak yang berbedabeda untuk berbagai komoditas. Misalnya untuk melindungi produsen dalam negeri, pemerintah dapat meningkatkan tarif pajak yang tinggi untuk barang impor. Hal tersebut menyebabkan konsumen membeli produk dalam dalam negeri yang harganya relatif lebih murah.

b. Pemberian subsidi, Pemerintah dapat melakukan intervensi atau campur tangan dalam pembentukan harga pasar yaitu melalui pemberian subsidi. Subsidi biasanya diberikan pemerintah kepada perusahaan-perusahaan penghasil barang kebutuhan pokok. Subsidi juga diberikan kepada perusahaan yang baru berkembang untuk

menekan biaya produksi supaya mampu bersaing terhadap produk-produk impor. Kebijakan ini ditempuh pemerintah dalam upaya pengendalian harga untuk melindungi produsen maupun konsumen sekaligus untuk menekan laju inflasi.

#### **2.4 Gambir**

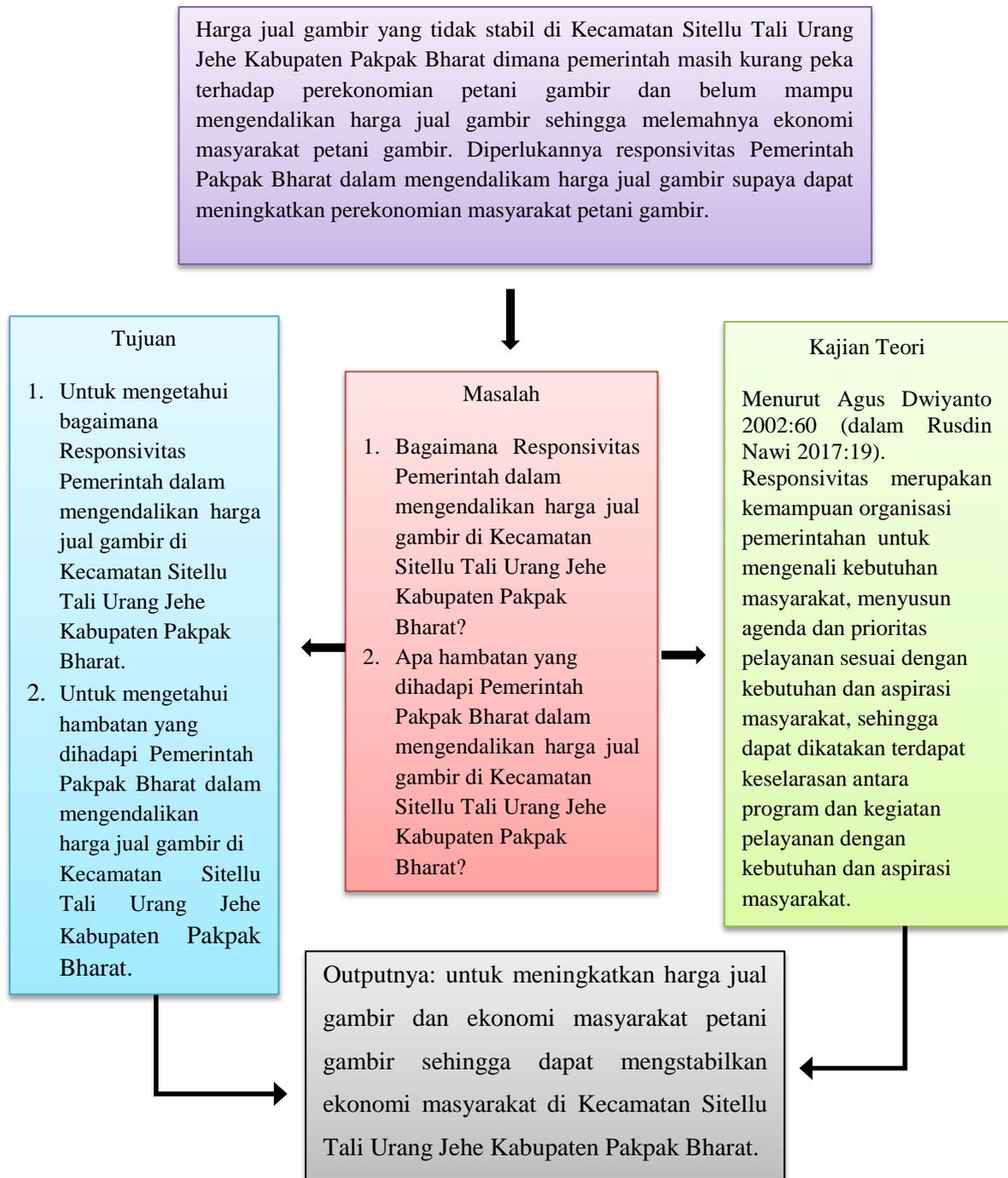
Tanaman gambir tumbuh baik pada daerah dengan ketinggian 900 m dari permukaan laut. Tanaman ini membutuhkan cahaya matahari penuh serta curah hujan merata sepanjang tahun. Bagian tanaman gambir yang dipanen adalah daun dan ranting yang selanjutnya diolah untuk menghasilkan ekstrak gambir yang bernilai ekonomis (Surbakti, 2014). Panen dan pemangkasan daun dilakukan setelah tanaman berumur 1,5 tahun. Pemangkasan dilakukan 2-3 kali setahun dengan selang 4-6 bulan. Pangkasan daun dan ranting harus segera diolah, karena jika pengolahan ditunda lebih dari 24 jam, getahnya akan berkurang (Alim, 2011). Gambir mengandung katekin yang merupakan komponen utama. Katekin merupakan senyawa *flavonoid* yang dapat ditemukan pada teh hijau, teh hitam, gambir, anggur dan tanaman pangan lainnya seperti buah-buahan dan kakao. Katekin larut dalam alkohol dingin, etil asetat, air panas serta asam asetat glasial dan aseton dan berguna sebagai antibiotik (Damanik, dkk 2014).

Proses pengolahan gambir adalah proses pengeluaran getah yang terkandung dalam daun dan ranting dengan menggunakan alat pengepres, sedangkan bahan yang akan dikeluarkan adalah *catechin*, kandungan inilah yang menentukan persyaratan mutu gambir. Bagian gambir yang dipanen adalah daun dan ranting yang selanjutnya diolah untuk menghasilkan ekstrak gambir yang

bernilai ekonomis (Alim, 2011). Secara visual sekelompok biji yang normal berwarna coklat, sedangkan kelompok biji yang cacat berwarna hitam. Untuk mendapatkan benih yang mempunyai daya kecambah yang tinggi, dapat dipilih sekumpulan benih yang 25 bintik berwarna coklat. Biasanya untuk penanaman seluas 1 ha diperlukan benih 1 kotak korek api dengan luas persemaian 7m<sup>2</sup> (Dhalami, 2006).

Gambir adalah komoditas yang banyak digunakan sebagai bahan baku industri seperti industri farmasi, kosmetik, makanan, kulit dan tekstil. Komoditas gambir banyak digunakan sebagai bahan baku industri berhubungan erat dengan zat yang dikandungnya. Penggunaan gambir ada 3 cara yaitu : 1) Penggunaan gambir secara tradisional secara tradisional gambir digunakan sebagai pelengkap makan sirih dan obat-obatan. 2) Gambir sebagai bahan baku dalam industri farmasi dan makanan. 3) Gambir sebagai bahan baku industri kulit dan kosmetik.

## 2.5 Kerangka Konseptual



**Gambar 2.1 Kerangka Konseptual**

*Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2023*

Berdasarkan harga jual gambir di Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe yang tidak setabil sehingga petani gambir tidak dapat mencukupi kebutuhan dan perekonomian. Pemerintah masih kurang peka terhadap perekonomian petani gambir dan belum mampu mengendalikan harga jual gambir sehingga melemahnya ekonomi masyarakat petani gambir. Diperlukannya responsivitas Pemerintah Pakpak Bharat dalam mengendalikan harga jual gambir supaya dapat meningkatkan perekonomian masyarakat petani gambir. Tujuan dari penelitian ini ialah Untuk mengetahui bagaimana Responsivitas Pemerintah dalam mengendalikan harga jual gambir di Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat dan untuk mengetahui hambatan yang dihadapi Pemerintah Pakpak Bharat dalam mengendalikan harga jual gambir di Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat. Menurut Agus Dwiyanto 2002:60 (dalam Rusdin Nawi 2017:19). Responsivitas merupakan kemampuan organisasi pemerintahan untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, sehingga dapat dikatakan terdapat keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dari penelitian ini penulis berharap output yang dihasilkan ialah meningkatkan harga jual gambir dan ekonomi masyarakat petani gambir sehingga dapat menstabilkan ekonomi masyarakat di Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat dilakukannya suatu penelitian ilmiah, lokasi penelitian ditetapkan oleh peneliti berdasarkan pertimbangan yang ada. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena salah satu lokasi yang memiliki lahan pertanian yang luas dan jumlah produksinya yang cukup besar dalam bidang pertanian, khususnya gambir. Akan tetapi di Kecamatan Sitellu Tali Urang dimana pemerintah masih kurang peka terhadap perekonomian petani gambir dan belum mampu mengendalikan harga jual gambir sehingga melemahnya ekonomi masyarakat petani gambir.

#### **3.2 Pendekatan Penelitian**

Penelitian pendekatan kualitatif merupakan metode yang bermaksud untuk memahami apa yang dialami oleh subjek penelitian secara keseluruhan dengan cara deskriptif dalam kata-kata dan bahasa pada konteks khusus yang alamiah dan dengan menggunakan metode ilmiah (Moleong, 2017:6). Pendekatan kualitatif merupakan suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terperinci dari pandangan responden dan melakukan studi pada situasi yang alami. Berdasarkan tujuan peneliti, penelitian bisa dibedakan ke dalam jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk

menggambarkan atau melukiskan apa yang sedang diteliti dan berusaha untuk memberikan gambaran yang jelas dan mendalam tentang apa yang diteliti dan menjadi pokok masalah.

### 3.3 Informan Penelitian

Informan peneliti adalah orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi ataupun kondisi latar belakang penelitian . Informan merupakan orang-orang yang dipilih untuk diwawancara sesuai dengan tujuan peneliti untuk memberikan berbagai informasi yang dibutuhkan selama proses penelitian.

Penelitian ini melibatkan beberapa informasi yang telah dipilih dengan pertimbangan tertentu (*purposive*). Menurut Sugiyono (2021: 135) *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang dilakukan dan didasari oleh pertimbangan tertentu yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. *Purposive sampling* dikmaksudkan agar dapat memberikan informasi yang di butuhkan dalam penelitian. Adapun informan yang telah ditetapkan peneliti dalam pelaksanaan penelitian ini diantaranya, yaitu:

**Tabel 3.1 Daftar Informan Penelitian**

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Adei Johan Misidi Banurea, S.P.,M.P	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pakpak Bharat	<i>Purposive sampling</i>
2	Elhidayat Berutu, S.H., M.AP	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	<i>Purposive sampling</i>
3	Mike Baskara Ujung	Camat Kecamatan STTU JEHE	<i>Purposive sampling</i>
4	Miston Sagala	Tengkulak Gambir	<i>Purposive sampling</i>
5	Jalinah Simbolon	Petani Gambir	<i>Purposive sampling</i>
6	Jales Padang	Petani Gambir	<i>Purposive sampling</i>
7	Maina Brutu	Petani Gambir	<i>Purposive</i>

*Sumber: Hasil Observasi*

### **3.4 Sumber Data**

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain (Loftland dalam Moleong 2005; 157). Ada dua jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

#### **1. Data Primer**

Sumber data primer diperoleh melalui kegiatan wawancara dengan subjek penelitian dan dengan observasi atau pengamatan langsung dilapangan. Menurut Sugiono (2016:225) data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dalam penelitian ini data primer berupa catatan hasil wawancara dan hasil observasi langsung dilapangan yang didapatkan melalui wawancara dengan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Camat Kecamatan STTU JEHE di Kabupaten Pakpak Bharat, pengepul gambir, serta beberapa masyatrakat petani gambir.

#### **2. Data Sekunder**

Sumber data sekunder digunakan untuk mendukung informasi yang didapatkan dan sumber data primer yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, dokumen, perundang-undangan, laporan-laporan, kegiatan yang diadakan oleh perpustakaan dan lain-lain. Menurut Sugiono (2016:225) berpendapat bahwa data sekunder merupakan sumber data

yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, contohnya melalui orang lain atau lewat dokumen.

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan beberapa teknik, yaitu sebagai berikut:

1. Wawancara

Menurut Sugiono (2015: 231) wawancara adalah teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.

Teknik wawancara yang dilakukan penulis adalah wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur merupakan wawancara yang bebas, dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanya. Wawancara yang dilakukan berupa tanya jawab secara langsung terkait permasalahan Responsivitas Pemerintah Pakpak Bharat Dalam Mengendalikan Harga Jual Gambir dengan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Kepala Bagian dari dinas-dinas tersebut, tengkulak dan masyarakat petani yang berada di Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat.

## 2. Observasi

Teknik observasi merupakan pengamatan sistematis berkaitan dengan perhatian terhadap fenomena yang terlihat. Observasi dalam hal ini dilakukan untuk melihat teknik pengelolaan tanaman gambir oleh masyarakat. Menurut Moleong 2009:147 (dalam Atmaja 2020). Pengumpulan data dengan metode observasi memungkinkan peneliti untuk mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan pengetahuan proposional maupun pengetahuan yang langsung diperoleh dari data. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan observasi non partisipant merupakan observasi yang dilakukan penulis dengan cara mendatangi langsung, melihat, kemudian mencatat perilaku sebagaimana yang terjadi pada keadaan yang sebenarnya di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pakpak Bharat. Mengamati sendiri ketempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat langsung dalam kegiatan tersebut.

## 3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan dan kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni yang dapat berupa gambar, patung, film dan sebagainya. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara (Sugiyono, 2016: 240).

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan teknik dokumentasi berupa foto dengan para informan seperti foto bersama kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pakpak Bharat, pengepul, camat, petani penulis menggunakan dokumen-dokumen, catatan-catatan, dan arsip-arsip yang ada pada dinas antara lain: Indakop, Distan, Camat. Disamping dokumen yang tertulis yang berupa data-data, juga dilakukan pencarian informasi melalui internet.

### **3.6 Teknik Analisis Data**

Menurut Sugiyono (2016) Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang didasarkan oleh data. Data yang terkumpul dapat berupa catatan lapangan dan komentar peneliti, gambar/foto, dokumen, laporan, biografi, artikel, dan sebagainya. Kegiatan analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

#### **1. Reduksi Data**

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data dasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus-menerus selama penelitian berlangsung bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih peneliti.

#### **2. Penyajian Data**

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan dan bagan. Bentuk-bentuk ini menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, sehingga memudahkan untuk melihat apa yang sedang terjadi, apakah kesimpulan sudah tepat atau sebaliknya melakukan analisis kembali.

### 3. Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data penelitian kualitatif menurut Milles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan/kegiatan penyimpulan adalah tahap lanjut dari kegiatan reduksi dan penyajian data.

Kesimpulan awal yang dikembangkan masih bersifat sementara dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti yang kuat untuk mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tapi apa bila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel (Sugiyono 2013:252).

### 3.7 Jadwal Penelitian

Adapun jadwal beserta rangkaian kegiatan penelitian ini direncanakan berlangsung dalam beberapa tahap, seperti yang disajikan dalam tabel penelitian berikut ini:

**Tabel 3.2 Jadwal Penelitian**

No	Uraian Kegiatan	Waktu Penelitian 2022/2023											
		Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jul	Ags	Okt	Des	
1	Pengajuan Judul												
2	Persiapan Proposal												
3	Bimbingan Proposal Skripsi												
4	Seminar Proposal												
5	Cetak Proposal Skripsi												
6	Bimbingan Skripsi												
7	Seminar Hasil												
8	Sidang Skripsi												

*Sumber: Hasil Observasi*

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Hasil Penelitian**

##### **4.1.1 Profil Kabupaten Pakpak Bharat**

Kabupaten Pakpak Bharat lahir berdasarkan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara. Pakpak Bharat terletak di kaki pegunungan bukit barisan. Kabupaten Pakpak Bharat terbentuk pada tanggal 28 Juli 2003 dan merupakan hasil dari pemekaran Kabupaten Dairi, Ibu kota kabupaten ini berada di Kecamatan Salak. Kabupaten Pakpak Bharat berbatasan dengan:

1. Sebelah Utara dengan Kabupaten Dairi
2. Sebelah Timur dengan Kabupaten Samosir
3. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kabupaten Humbang Hasundutan
4. Sebelah Barat dengan Kabupaten Aceh Singkil (Provinsi Aceh) dan Kota Subulussalam (Provinsi Aceh)

Berdasarkan wilayah administrasi pemerintahan, Kabupaten Pakpak Bharat terdiri dari 8 (delapan) kecamatan yaitu terdiri dari :

1. Kecamatan Kerajaan, Luas 147,61 km<sup>2</sup>
2. Kecamatan Pagindar, Luas 75,45 km<sup>2</sup>
3. Kecamatan Pergetteng-getteng Sengkut, Luas 66,64 km<sup>2</sup>
4. Kecamatan Salak, Luas 245,57 km<sup>2</sup>
5. Kecamatan Siempat Rube, Luas 82,36 km<sup>2</sup>



7	Tinada	2.456	2.371	4.827	72,03 km <sup>2</sup>	53
8	Siempat Rube	2.736	2.619	5.355	82,36 km <sup>2</sup>	53

Sumber: [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Pakpak\\_Bharat](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Pakpak_Bharat)

Kabupaten Pakpak Bharat merupakan hasil pemekaran Kabupaten Dairi berdasarkan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara. Wilayah administrasi Kabupaten Pakpak Bharat pada tahun 2020 terdiri dari 8 kecamatan dengan 52 desa. Kecamatan Salak dan Sitellu Tali Urang Jehe merupakan kecamatan dengan jumlah desa terbanyak, yaitu 10 desa. Sedangkan Kecamatan Pagindar merupakan kecamatan dengan jumlah desa yang paling sedikit, yaitu hanya 4 desa.

Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe merupakan kecamatan dengan wilayah terluas yaitu 473,62 km<sup>2</sup> dari total luas Kabupaten Pakpak Bharat, sementara Sitellu Tali Urang Julu merupakan wilayah terkecil yaitu 53,02 km<sup>2</sup> dari total luas Kabupaten Pakpak Bharat. Kecamatan Pagindar merupakan kecamatan yang paling jauh dari ibu kota Pakpak Bharat yaitu berjarak sekitar 120 kilometer ke ibu kota kecamatan.

#### **4.1.2 Deskripsi Umum Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe**

Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe secara administratif yang merupakan salah satu wilayah dari 8 kecamatan dengan jumlah desa terbanyak, yaitu 10 desa antara lain; Bandar Baru, Kaban Tengah, Maholida, Malum. Mbinalun, Perjaga, Perolihen, Simberuna, Tanjung Meriah, Tanjung Mulia. Jumlah penduduk sekitar yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani. Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe merupakan kecamatan dengan wilayah terluas yaitu 473,62 km<sup>2</sup>,

dengan jumlah keseluruhan penduduk 5.794 jiwa laki-laki dan 5.692 jiwa perempuan dan terdiri dari 10 desa.

Seperti wilayah dengan iklim tropis lainnya, wilayah Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe mengalami musim hujan dan musim kemarau. Sungai atau *Lae* yang mengalir di kecamatan ini disebut *Lae Kombih*. Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe memiliki batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan : Kecamatan Silima Pungga-pungga, Kecamatan Lae Parira, Kecamatan Sidikalang
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan : Kecamatan Salak dan Kerajaan
- c. Sebelah barat berbatasan dengan : Kota Subulussalam
- d. Sebelah timur berbatasan dengan : Kecamatan Kerajaan

Pada umumnya mata pencarian masyarakat Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe adalah petani. Aktivitas yang dilakukan masyarakat Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe yaitu sebagai petani gambir yang dilakukan setiap hari, dan petani jagung, cabai. Petani gambir di Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe umumnya termasuk dalam kategori petani kecil karena mereka memanen kebunnya sendiri dan menjual hasilnya (getah gambir) kepada pengepul setempat. Selain petani gambir, masyarakat Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe juga bekerja sebagai petani jagung, petani cabai. Mata pencarian masyarakat Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe tidak hanya sebagai petani, sebagian kecilnya masyarakat bekerja

sebagai pedagang, pegawai ASN pemerintahan, ASN guru, dan Abdi Negara (TNI dan Polisi).

## **4.2 Responsivitas Pemerintah Pakpak Bharat dalam Mengendalikan Harga Jual Gambir**

### **4.2.1 Kemampuan Mengenali Kebutuhan Petani Gambir**

Pemerintah berperan untuk mengenali kebutuhan para petani gambir Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe. Dalam bertani para petani mengharapkan hasil panen yang melimpah dan harga jual yang tinggi agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Pakpak Bharat dengan mayoritas penduduknya sebagai petani gambir. Seperti yang didapatkan dari masyarakat harga yang ditawarkan sangatlah tidak sesuai untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Selama ini harga yang ditawarkan sangat tidak seimbang dengan tenaga dan waktu yang diberikan petani.

Tingkat kepuasan masyarakat petani atas pelayanan yang diberikan pemerintah dan dinas masih kurang. Untuk mengenali keinginan, kebutuhan dan kepentingan masyarakat petani gambir pemerintah harus bisa mendekati diri dengan petani gambir. Pemerintah harus dapat mengidentifikasi kebutuhan petani gambir sehingga pemerintah dapat menciptakan kebijakan yang strategis.

Berdasarkan data temuan dilapangan penelitian yaitu, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, pada aktivitas pelayanan yang dilakukan untuk mengendalikan harga gambir. Jika dilihat dari kemampuan mengenali kebutuhan petani gambir ditemukan beberapa hal yang mempengaruhi harga gambir. Hal-hal

yang mempengaruhi harga gambir dari kemampuan mengenali kebutuhan petani gambir ialah kurangnya pendekatan pemerintah kepada petani gambir mengenai apa yang mereka butuhkan untuk meningkatkan kelangsungan pengolahan gambir mereka.

Menurut Elhidayat Berutu, S.H., M.AP selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah mengatakan bahwa:

“Dari Dinas sendiri telah menyarankan kepada petani untuk meningkatkan kualitas getah gambir mereka supaya dapat mempertahankan harga gambir tersebut. Tapi disini petani masih kurang peduli dan juga tidak mau ikut usaha, hari ini panen hari ini juga harus mendapatkan uang. Sekarang ini yang mengatur harga itu pengepul. Kualitas produk mempunyai pengaruh dalam meningkatkan volume penjualan. Semakin baik kualitas gambir akan meningkatkan harga jual dan harga jual akan meningkatkan volume penjualan. Seharusnya petani kompak membuat cetakan gambir yang sama, agar bentuk dari getah gambir tidak beragam. Sehingga ketika di jemur tingkat kering getah gambir tersebut sempurna. Ketika getah gambir dikeringkan atau dijemur dengan baik dan benar maka akan semakin mahal karena sudah berkurang kadar air yang ada di dalam getah tersebut. Karena kebutuhan petani, maka mereka tidak mau mendengarkan lagi saran dari dinas, kalau bisa hari ini panen hari ini juga harus ada uangnya”. (Wawancara, 13 juli 2023)

Wawancara diatas menjelaskan terdapat kesenjangan antara saran dari Dinas kepada petani untuk meningkatkan kualitas getah gambir demi mempertahankan harga yang menguntungkan. Namun, petani cenderung kurang responsif dan lebih memprioritaskan kebutuhan ekonomi harian. Mereka berpendapat bahwa "hari ini panen, hari ini harus ada uangnya" sebagai prioritas utama mereka. Dalam situasi ini, pengepul menjadi pengatur harga gambir, dan kurangnya kesadaran petani terhadap pengaruh kualitas produk terhadap volume penjualan menciptakan tantangan dalam mengoptimalkan nilai jual gambir.

Meski Dinas telah menyarankan untuk membuat cetakan gambir seragam guna meningkatkan proses pengeringan, petani belum menunjukkan komitmen kolektif dalam menerapkan saran tersebut. Dengan demikian, kualitas hasil gambir masih bervariasi, mempengaruhi potensi harga jual yang lebih tinggi. Ketidakselarasan antara saran untuk peningkatan kualitas dan respons petani yang lebih terfokus pada kebutuhan finansial segera, menimbulkan tantangan dalam mencapai perubahan yang berkelanjutan di sektor pertanian gambir.

Penelitian sebelumnya, Berutu (2021) mencatat bahwa pemerintah telah berusaha dalam memberdayakan pengolahan gambir dan memberikan saran kepada petani. Responsivitas pemerintah terhadap petani telah ada, namun terdapat kekurangan dalam pelaksanaan tindakan yang lebih mendalam terkait upaya yang telah dijalankan. Meskipun responsivitas pemerintah terhadap petani gambir sudah mengalami peningkatan, masih diperlukan upaya lebih lanjut agar pelayanan dan dukungan yang diberikan dapat secara efektif memenuhi kebutuhan petani secara keseluruhan.

Meskipun penelitian sebelumnya mencatat peningkatan responsivitas pemerintah dalam pelayanan kepada petani, wawancara ini mengindikasikan bahwa responsivitas tersebut masih perlu ditingkatkan. Terdapat kesenjangan antara saran yang diberikan dan respons petani, menciptakan tantangan dalam mencapai keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, sebagaimana dijelaskan dalam teori responsivitas.

Berdasarkan wawancara menurut Jales Padang selaku petani gambir mengatakan bahwa:

“Saya sangat berharap pihak pemerintah bisa lebih memperhatikan kami petani gambir ini, memberikan bantuan secara merata. Dan membantu para petani agar harga gambir ini tidak turun drastis sehingga dapat mencukupi kebutuhan hidup petani”. (Wawancara, 03 juli 2023)

Wawancara tersebut mencerminkan keprihatinan terhadap nasib petani gambir dan mendesak pemerintah untuk memberikan perhatian lebih. Permintaan tersebut mencakup distribusi bantuan merata kepada petani dan upaya pencegahan penurunan drastis harga gambir. Harapannya adalah agar petani gambir dapat mencukupi kebutuhan hidup mereka.

Jales padang selaku petani gambir mengekspresikan harapannya akan perhatian lebih dari pemerintah terhadap petani gambir, melibatkan berbagai bentuk bantuan seperti subsidi, pelatihan, dan bantuan finansial lainnya. Menyoroti kebutuhan untuk mencegah penurunan drastis harga gambir, menunjukkan kekhawatiran terhadap stabilitas ekonomi petani. Pemerintah masih kurang memperhatikan masyarakat petani gambir, dan harapan petani adalah adanya perhatian dan bantuan yang merata. Meskipun pemerintah telah memberikan bantuan pada penelitian sebelumnya, pada penelitian ini, harapannya adalah agar bantuan tersebut lebih merata dan sesuai dengan kebutuhan aktual petani. Pemerintah diharapkan dapat mengendalikan harga gambir untuk memastikan bahwa para petani dapat mencukupi kebutuhan hidup mereka secara layak dan berkelanjutan.

Responsivitas terlihat dalam harapan petani terhadap tindakan responsif dari pemerintah terhadap kondisi mereka. Responsivitas yang baik akan menciptakan keseimbangan antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan masyarakat, termasuk petani gambir, sehingga dapat memastikan pelayanan dan dukungan yang sesuai dan relevan bagi mereka. Responsivitas pemerintah akan tercermin dalam upaya pemerintah untuk merespons keluhan dan kebutuhan tersebut. Permintaan distribusi bantuan merata dan upaya pencegahan penurunan harga gambir mencerminkan aspirasi petani yang seharusnya diakomodasi oleh pemerintah.

Jalinah Simbolon juga menambahkan selaku Petani gambir beliau mengatakan bahwa:

“Kalau dari Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian ada memberikan bantuan, berupa bantuan bibit gambir, sarana dan prasarana pengolahan dari getah sampai dengan menjadi gambir kering. Namun bantuan itu hanya di berikan ke beberapa petani saja sehingga belum merata”.  
(Wawancara, 03 juli 2023)

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Maina Berutu selaku Petani gambir beliau mengatakan bahwa:

“Pemerintah memang ada memberikan bantuan tapi itu beberapa tahun lalu dan bantuan itu cuma sekali di berikan dan tidak semua petani juga mendapatkan bantuan”.

Berdasarkan wawancara diatas dideskripsikan bahwasanya Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian memberikan bantuan, berupa bantuan bibit gambir, sarana dan prasarana pengolahan seperti

peralatan press gambir, dandang perebusan, serta penyaring. Bantuan tersebut berguna untuk pengolahan gambir dari getah sampai dengan menjadi gambir kering.

Pemerintah dan Dinas masih memperhatikan para petani gambir dan masih peduli terhadap kesejahteraan petani gambir yaitu dengan cara memberikan bantuan berupa bibit gambir, dandang dan pemberian pelatihan kepada petani gambir. Pada tahun 2022 Bupati dan Dinas memberikan bantuan peralatan press gambir, dandang perebusan, serta penyaring. Setelah menerima bantuan beberapa bulan kemudian pemerintah turun kelapangan untuk mengecek kembali ternyata ada bantuan dari dinas yang tidak dipergunakan dengan baik/rusak, bahkan ada yang menjualnya

Berdasarkan penelitian dilapangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pakpak Bharat memberikan bantuan berupa bibit gambir kepada para masyarakat atau para petani gambir. Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah ada memberikan bantuan berupa alat pengolahan gambir, tetapi masih ada bantuan dari dinas yang tidak digunakan dengan baik, sehingga membuat Dinas merasa kecewa karena bantuannya tidak di manfaatkan sebaik mungkin. Penelitian Wani (2019) mengenai responsivitas pemerintah dalam menstabilkan harga karet dimana pemerintah juga melakukan upaya dalam menstabilkan harga karet dengan memberi bantuan berupa alat panen karet atau barang yang berguna bagi proses pertanian karet, tetapi kendala yang di alami kurang meratanya pemberian bantuan dari pemerintah. Dari hasil diatas didapat bahwa tindakan

responsivitas pemerintah sudah dilakukan dengan membantu petani dalam memberi bantuan alat tani tetapi kendala pemerataan bantuan ini yang mengakibatkan tidak adanya pengaruh besar dan pemerintah kurang dalam melakukan sosialisasi mengenai tindakan bantuan yang di berikan.

#### **4.2.2 Menyusun Agenda dan Prioritas Pelayanan Sesuai Kebutuhan Dan Aspirasi Petani Gambir**

Aspirasi petani gambir merupakan keluhan dan kebutuhan dari petani gambir. Dalam hal ini petani gambir banyak mengeluh dengan harga yang rendah tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari. Dengan penghasilan yang rendah ini pula petani gambir merasakan sulitnya melangsungkan hidup di era yang serba modern ini.

Menurut Adei Johan Misidi Banurea, S.P.,M.P selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pakpak Bharat, mengatakan bahwa:

“Sebenarnya pemerintah bukannya tidak bertanggung jawab akan tetapi anggaran yang dimiliki tidak memadai dimana banyaknya petani gambir yang ada di Kabupaten Pakpak Bharat terkhusus Di Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe. Pemerintah memberikan bantuan kepada petani gambir hanya saja bantuan tersebut tidak mencakup ke semua petani gambir”. (Wawancara, 24 juli 2023)

Wawancara diatas menjelaskan bahwa pemerintah masih peduli terhadap petani gambir akan tetapi bantuan tidak mencakup keseluruhan masyarakat petani gambir dikarenakan kurangnya dana yang di miliki.

Tindakan pemerintah Pakpak Bharat yang sudah di teliti Berutu (2021) menunjukkan tingkat bantuan pemerintah yang sudah dilakukan berupa sosialisai, pemberdayaan petani gambir. Tetapi kendala yang dialami kurangnya dana dalam melakukan kegiatan itu kepada seluruh petani gambir. Dari responsivitas diatas pemerintah hanya melakukan kegiatan pemeberdayaan petani tanpa memperhatikan banyaknya petani gambir yang memerlukan bantuan itu, hal itu

menjadi kendala yang membuat petani gambir tidak ada kemajuan. Dan diharapkan tindakan lebih lanjut untuk menaikkan taraf ekonomi petani gambir Kabupaten Pakpak Bharat.

Ditambah oleh Maina Berutu juga menambahkan selaku petani gambir Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe mengatakan bahwa:

“Secara langsung pemerintah tersebut tidak bertanggung jawab dengan petani gambir, karena hanya sebagian petani gambir yang mendapatkan bantuan. Pemerintah hanya turun tangan saat memberikan bantuan. Berarti secara keseluruhan pemerintah tidak mau tahu tentang gambir ini”. (Wawancara, 03 juli 2023)

Ditambah oleh Jalinah Simbolon juga menambahkan selaku Petani gambir beliau mengatakan bahwa:

“Dinas setempat tidak ada upaya karena petani gambir ini tidak dikelola oleh dinas. Dan pemerintah masih kurang peduli terhadap petani gambir”. (Wawancara, 03 juli 2023)

Berdasarkan wawancara diatas dapat dijelaskan Dinas Pertanian sudah berupaya untuk mensejahterakan para petani gambir, dan dinas tersebut masih mau turun tangan dengan memberikan sosialisasi kepada para petani mengenai penanaman dan pengolahan petani yang baik dan benar. Akan tetapi masih ada beberapa petani yang tidak peduli dengan kehadiran dinas.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa masih kurangnya responsivitas dari pemerintah terhadap petani gambir. Kurangnya respon pemerintah tersebut membuat para petani kecewa karena mereka sangat berharap pemerintah dapat lebih memperhatikan harga gambir untuk kesejahteraan para petani, agar para petani dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Hasil penelitian Tinendung (2017) menunjukkan kendala kurangnya peran pemerintah, terutama pemerintah desa

sekitar petani gambir. Akan tetapi dinas Kabupaten Pakpak Bharat sudah bertanggung jawab dan berupaya untuk kesejahteraan petani. Dan diharapkan pemerintah juga memberi sosialisasi kepada pemerintah desa mengenai pengelolaan gambir. Dimana kegiatan responsivitas yang sudah berjalan di harapkan saling terhubung antar pemerintah kabupaten maupun pemerintah desa.

Ditambah oleh Mike Baskara Ujung Camat Kecamatan Sitellu Tali Urang

Jehe mengatakan bahwa:

“Dengan harga yang tidak stabil sangat tidak mencukupi kebutuhan. Harga yang ditawarkan dari Rp.23.000/kg-Rp.60.000/kg tidak dapat memenuhi kebutuhan dan gaya hidup sekarang ini. Jika kita hanya bergantung kepada getah kering gambir, untuk makanpun susah, sehingga harus ada pekerjaan lain yang membantu untuk mencukupi kebutuhan hidup”. (Wawancara, 24 juli 2023)

Dari wawancara diatas dapat dilihat bahwa harga gambir yang begitu rendah sangat tidak mencukupi kebutuhan hidup para petani. Petani tidak dapat bergantung hanya dari hasil panen gambir, petani juga harus mempunyai pekerjaan sampingan. Responsivitas pemerintah kecamatan yang memahami bahwa harga gambir yang tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup. Hasil penelitian Tinendung (2017) menunjukkan kendala yang dialami petani karena kurangnya pendidikan yang dapat mempengaruhi pola pikir petani. Dari hasil itu didapat sebuah responsivitas dimana pemerintah memahami harga gambir tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup dan petani dituntut untuk lebih memperluas pola pikir untuk menambah kebutuhan hidup.

Maina Berutu juga menambahkan selaku petani gambir Kecamatan Sitellu

Tali Urang Jehe mengatakan bahwa:

“Dengan harga yang tidak stabil ini mengakibatkan perekonomian pun semakin menurun. Cuaca yang tidak menentu membuat kami sebagai petani kesulitan dalam pengeringan gambir. Akan tetapi dengan adanya tanaman-tanaman lain walaupun harga gambir rendah kebutuhan dapat tertutupi dari tanaman- tanaman lain. Jadi walaupun harganya tidak stabil dapat dibantu dari harga tanaman-tanaman muda”. (Wawancara, 03 juli 2023)

Berdasarkan wawancara diatas harga gambir yang rendah ini bukan disebabkan oleh tengkulak yang mengambil keuntungan, akan tetapi sudah ditetapkan oleh pusat. Harga yang rendah ini juga menyebabkan kurangnya perekonomian para masyarakat khususnya petani gambir.

Menurut Miston Sagala selaku tengkulak gambir di kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe mengatakan bahwa:

“Banyak sekali keluhan dari para petani, karena petani juga membutuhkan uang untuk menghidupi keluarganya. Petani meminta untuk dinaikkan harganya, tapi mau gimana lagi karena harga ini kan ditetapkan dari pusat, saya hanya mengikuti dan menjalankannya. Disini saya hanya bisa menyarankan kepada petani gambir untuk mengolah gambir dengan baik dan benar, menjaga kualitas getah gambirnya sehingga harga bisa stabil dan harga dapat semakin tinggi jika kualitas gambir yang diperoleh bagus ”. (Wawancara, 04 juli 2023)

Berdasarkan wawancara diatas terdapat banyak petani yang mengeluhkan harga ini kepada tengkulak, akan tetapi tengkulak tidak dapat berbuat banyak dikarenakan harga ini sudah di tetapkan oleh pusat. Tindakan responsivitas pemerintah kepada tengkulak tidak ada, karena pemerintah hanya memperhatikan petani tanpa memperhatikan para tengkulak sebagai penyedia jasa pengepul hasil tani gambir. Pemerintah juga harus memperhatikan seluruh aspek proses berjalannya sistem prekonomian para petani gambir.

Ditambah oleh Jalinah Simbolon selaku petani gambir mengatakan bahwa:

“ Petani gambir secara langsung tidak pernah siap dalam menghadapi naik turunnya harga gambir. Karena harga normalpun tidak mencukupi kebutuhan apalagi kalau harga rendah begini semakin tidak mencukupi, akan tetapi bagi petani yang tidak utuh bekerja sebagai petani gambir (ada pekerjaan sampingan) tidak masalah dengan naik turunnya harga ini”. (Wawancara, 03 juli 2023)

Berdasarkan wawancara diatas dapat dilihat bahwa petani tidak pernah merasa siap dan sering mengeluhkan ketidakstabilan harga gambir yang menyebabkan kurangnya perekonomian. Bagi petani gambir yang memiliki pekerjaan lain tidak masalah dengan tidak stabilnya harga ini, karena masih ada harapan lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Upaya dilakukan petani dalam memenuhi kebutuhan hidupnya seharusnya menjadi responsivitas pemerintah dengan membantu petani gambir dari segi hasil tani lainnya sehingga para petani juga tidak harus terfokus pada satu hasil tani saja.

#### **4.2.3 Keselarasan Program Dan kegiatan Pelayanan Dengan Kebutuhan dan Aspirasi Petani Gambir**

Mengembangkan program pelayanan sangat diperlukan untuk tercapainya suatu tujuan. Dalam hal ini Pemerintah memberikan saran dan solusi kepada para petani gambir agar nantinya dapat memiliki kehidupan yang sejahtera.

Menurut Adei Johan Misidi Banurea, S.P.,M.P selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pakpak Bharat, mengatakan bahwa:

”Harga gambir tergantung pasokan dunia, jadi berlakulah teori ekonomi, apabila barang banyak maka harga akan rendah dan apa bila barang itu sedikit maka harga akan tinggi. Namun pada gambir ini yang di lihat adalah kualitas getahnya (ketekin), untuk apa barang banyak tapi kualitas getah kurang. Sehingga kami menyarankan petani untuk menjaga kualitas getahnya. Jadi pemerintah mendirikan PD PAL (Perusahaan Daerah Pakpak Agro Lestari) dengan adanya PD PAL semua akan dapat dikelola. Apabila harga itu tinggi kita bisa menerimanya, dan apa bila harga itu rendah kita bisa

menampungnya dengan PD PAL tersebut, jadi ekonomi masyarakat akan dapat distabilkan dengan adanya PD PAL”. ( Wawancara, 17 juli 2023)

Dari wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa pemerintah mengatakan bahwa petani harus menjaga kualitas dari pada getah gambir. Pemerintah juga telah mendirikan PD PAL (Perusahaan Daerah Pakpak Agro Lestari) tujuan didirikan PD PAL ini untuk menampung hasil panen petani sehingga bisa diolah menjadi beberapa produk dan dijual langsung ke pasar medan melalui pengelolaan PD PAL. Dengan demikian petani dapat menjual hasil panennya lebih tinggi di saat tengkulak menawarkan harga rendah.

Pada penelitian ini pemerintah mendirikan program yang bertujuan membantu petani dalam memasarkan hasil produksinya. Dipenelitian terdahulu juga pemerintah ada membentuk suatu program yang dapat membantu dan meningkatkan pendapatan dari hasil produksi petani. Dimana dengan adanya program yang di buat dapat membantu meningkatkan perekonomian petani.

Menurut Elhidayat Berutu, S.H., M.AP selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah mengatakan bahwa:

“Solusi dalam mengatasi tidak stabilnya harga gambir ini ialah kita sama-sama mengajak masyarakat untuk meningkatkan kualitas produksi gambir sehingga harga gambir dapat stabil. Dinas juga membukakan informasi-informasi mengenai harga gambir dan membantu petani untuk memasarkan gambir melalui media sosial. Dalam hal ini kita juga harus sama-sama intropeksi, petani bertanya kenapa harga gambir rendah?, tetapi masih ada petani yang nakal, perebusan daun gambir di campur dengan sisa-sisa air pengendapan getah gambir sebelumnya, bahkan getah gambir ada yang dicampur dengan tepung. Ketika ketahuan oleh pusat atau eksportir maka harganya tidak akan dinaikkan lagi. Jadi kita perlu sama-sama menjaga kualitas gambir ini, tidak hanya dari dinas tetapi petani juga”. (Wawancara, 13 juli 2023)

Berdasarkan wawancara diatas bahwa solusi yang ditawarkan oleh Dinas ialah meningkatkan kualitas gambir sehingga harga jual gambir stabil dan petani gambir dapat sejahtera. Bahkan bukan hanya Dinas yang harus berupaya dan menjaga gambir ini, akan tetapi petani juga harus bahu membahu untuk menjaga kelestariannya.

Pemerintah didalam hal ini hanya melakukan pemasaran lewat media sosial saja tanpa melakukan kerjasama perusahaan-perusahaan nasional maupun internasional untuk memperluas pemasaran hasil tani gambir Kabupaten Pakpak Bharat. Dan di harapkan juga pemerintah membuat tim khusus untuk mengetahui kualitas standar gambir untuk dapat di ekspor dan membuat penyuluhan mengenai kualitas gambir kepada petani. Dan pemerintah dapat menjadi tengkulak besar hasil gambir untuk dapat memasarkan lewat media sosial dan perusahaan nasional maupun internasional.

Menurut Adei Johan Misidi Banurea, S.P.,M.P selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pakpak Bharat, mengatakan bahwa:

“Dinas juga mengingatkan para petani untuk mengolah gambir dengan benar dan tidak mencampurkan sisi-sisa dari air pengendapan getah sebelumnya ke perebusan daun, dan berharap petani gambir dapat sepakat menentukan bentuk cetakan gambir. Lebih bagus lagi jika masyarakat belajar untuk mengolah gambir tersebut benjadi sebuah produk untuk dijual tidak hanya getah keringnya saja”. (Wawancara, 17 juli 2023)

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dinas memberikan solusi untuk petani gambir agar lebih jujur dalam bekerja dan menjalankan segala saran yang diberikan oleh pemerintah. Dengan adanya solusi

dari dinas diharapkan petani dapat lebih kompeten dalam bekerja untuk mencapai kualitas hasil tani gambir.

Didalam hal ini juga Pemerintah Pakpak Bharat tidak ada memberikan terobosan mengenai sebuah produk gambir yang dapat dimanfaatkan masyarakat petani gambir untuk menambah nilai ekonomi. Pemerintah hanya memberikan saran kepada petani agar membuat sebuah produk.

Menurut Elhidayat Berutu, S.H., M.AP selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah mengatakan bahwa:

“Program dari Pemerintah Pakpak Bharat seperti membuat label halal, membuat label produk sekaligus pemerintah saat ini ingin mendaftarkan produk dari pengolahan gambir Pakpak Bharat ke HKI (Hak Kekayaan Intelektual) agar nanti produk olahan dari Gambir Pakpak Bharat ini mempunyai hak cipta sehingga produk yang kita miliki tidak di akui oleh instansi atau pihak" lain". (Wawancara, 17 juli 2023)

Dari wawancara diatas menjelaskan bahwa Pemerintah Pakpak Bharat telah melakukan program pembuatan label halal dan membuat label produk. Pemerintah juga saat ini akan mendaftarkan produk gambir Pakpak Bharat ke HKI (Hak Kekayaan Intelektual) agar produk gambir dari Kabupaten Pakpak Bharat tersebut mempunyai hak cipta sehingga produk tersebut tidak dapat sembarang di akui oleh instansi atau pihak manapun. Hasil penelitisn Evalisah (2020) mengenai responsivitas pemerintah dalam ketahanan pangan terdapat kendala pemerintah yang sudah melakukan upaya pengembangan peningkatan produksi beras dimana adanya pengalihan fungsi lahan tani. Hal ini juga menjadi kendala dimana pemerintah melakukan tindakan membuat label halal. Dimana para petani belum membuat sebuah produk yang dapat memakai label halal, hanya

beberapa produk dari pemerintah saja yang masih di produksi menggunakan label tersebut. Pemerintah juga harus membuat program-program lainnya yang membuat produk gambir dapat diakui dunia internasional. Dan diharapkan tindakan serius pemerintah dalam melaksanakan program lainnya.

#### **4.2.4 Hambatan Yang di Alami Pemerintah Pakpak Bharat Dalam Mengendalikan Harga Jual Gambir**

Dalam menjalankan suatu program pelayanan tentu saja ada hambatannya. Hambatan ini yang menjadi penghalang bagi pemerintah dalam mensejahterakan rakyat.

Menurut Elhidayat Berutu, S.H., M.AP selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah mengatakan bahwa:

“Tentu saja dalam menjalankan sebuah upaya pasti ada hambatannya. Didalam Perbup Pakpak Bharat Pemerintah menetapkan harga gambir Rp.90.000/kg tetapi harga dari pemerintah tidak menjadi patokan untuk tengkulak karena tengkulak menetapkan harga dari harga yang diberikan oleh eksportir. Di sini tengkulak yang menentukan harga kepada petani gambir karena tengkulak juga mendapatkan harga dari pusat. Walaupun tengkulak menentukan harga gambir pada petani gambir tetapi pemerintah tidak boleh hanya diam dan masyarakat juga seharusnya bertanya kepada tengkulak bagaimana agen menentukan harga gambir kepada tengkulak apakah dari kualitas, bentuk/ukuran, warna gambir. Seharusnya petani bisa bersama-sama menanyakan hal ini kepada tengkulak setempat”. (Wawancara, 13 juli 2023)

Berdasarkan wawancara diatas pemerintah sudah menentukan harga gambir didalam Perbup, tetapi tidak menjadi patokan kepada tengkulak dikarenakan tengkulak juga menetapkan harga sesuai yang di berikan oleh eksportir. Pemerintah tidak lepas tanggung jawab dan masih berperan dalam meningkatkan harga gambir.

Pemerintah hanya membuat perbub tanpa memberi patokan ke tengkulak hal itu membuat aturan yang dibuat tidak menguntungkan petani gambir, karena tengkulak membuat sitem harga sesuai eksportir. Diharapkan pemerintah juga memberikan perbub untuk para tengkulak dengan menguntungkan para petani maupun tengkulak itu sendiri.

Menurut Adei Johan Misidi Banurea, S.P.,M.P selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pakpak Bharat, mengatakan bahwa:

“Sumber Daya Manusia (SDM) juga merupakan sebagai penghambat perkembangan ekonomi petani gambir. Pertisipasi dan kesiapan petani yang masih kurang akan pentingnya menjaga kualitas dari getah gambir. Padahal ini menjadi keuntungan mereka sendiri nantinya, pola pikir yang tidak mau berubah dan masih berada di pola fikir yang ingin serba instan. Dalam pengembangan pengolahan getah gambir pemerintah belum dapat memberikan bantuan teknologi secara merata kepada para petani dimana kurangnya dana yang dimiliki sehingga hanya beberapa petani saja yang mendapatkan bantuan tersebut”. (Wawancara 17 juli 2023)

Dari hasil wawancara dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, terungkap beberapa hambatan yang dihadapi pemerintah dalam mengendalikan harga jual gambir. Salah satu hambatan utama adalah rendahnya pemahaman Sumber Daya Manusia (SDM) terkait cara memproduksi gambir yang baik. Meskipun pemerintah telah memberikan saran kepada petani gambir untuk mengikuti metode produksi yang disarankan guna menghasilkan getah gambir berkualitas, masih banyak petani yang tidak mendengar atau mengikuti petunjuk dari pemerintah dan dinas. Tinendung (2017) dalam penelitiannya menemukan kendala terkait pendidikan dan SDM, menyebabkan kualitas gambir yang dihasilkan kurang baik akibat kecurangan praktik-praktik tertentu. Proses pengolahan gambir yang tidak memadai juga mempengaruhi kualitas keringnya,

dan masyarakat cenderung lebih memprioritaskan harga daripada kualitas gambir itu sendiri. Selain itu, harga gambir yang ditentukan oleh pemerintah lebih rendah daripada yang ditetapkan oleh Peraturan Bupati (Perbup). Hambatan lain yang dihadapi pemerintah adalah keterbatasan dana untuk menyediakan bantuan teknologi, seperti alat pengolahan gambir, yang belum dapat dibagikan secara merata kepada seluruh masyarakat petani gambir.

Sementara itu, wawancara sebelumnya membahas peran kritis SDM dalam menghambat perkembangan ekonomi petani gambir, dengan fokus pada partisipasi dan kesiapan petani. Ironisnya, upaya untuk meningkatkan kualitas getah gambir dapat menjadi keuntungan bagi petani di masa mendatang, namun pola pikir yang enggan berubah, yang masih mendukung keinginan akan hasil instan, menciptakan tantangan tersendiri. Dalam pengembangan pengolahan getah gambir, pemerintah dihadapkan pada keterbatasan dana yang mengakibatkan bantuan teknologi tidak dapat disalurkan secara merata kepada semua petani. Dengan demikian, sementara pemerintah berupaya mengatasi hambatan finansial, perubahan pola pikir petani dan peningkatan partisipasi juga menjadi kunci dalam memperkuat fondasi perkembangan ekonomi yang berkelanjutan dalam sektor pertanian gambir.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan peneliti pada bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemerintah memiliki peran penting dalam mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh petani gambir di Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe, Kabupaten Pakpak Bharat. Meskipun telah ada upaya dari pemerintah, termasuk bantuan, pelatihan, dan solusi untuk meningkatkan kualitas gambir, masih terdapat kendala dalam implementasinya. Beberapa kendala yang dihadapi termasuk kurangnya responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan petani, kurangnya keselarasan antara program pemerintah dan aspirasi petani, serta kesulitan dalam mengatasi faktor ekonomi yang mempengaruhi harga gambir. Selain itu, masih ada tantangan terkait pemasaran internasional, kerjasama dengan perusahaan nasional dan internasional, serta implementasi program-label halal dan hak cipta. Meskipun telah ada langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah, evaluasi menunjukkan bahwa masih diperlukan tindakan serius dan peningkatan implementasi program untuk meningkatkan pengakuan dan kesejahteraan petani gambir secara global.
2. Pemerintah telah menetapkan harga gambir melalui Peraturan Bupati (Perbup), tetapi implementasinya menghadapi kendala. Tengkulak tidak mengikuti harga yang ditetapkan dan menyesuaikannya dengan yang

diberikan oleh eksportir. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan harga gambir dan perlu menyesuaikan aturan yang ada agar menguntungkan baik petani maupun tengkulak. Kendala yang dihadapi pemerintah mencakup rendahnya pemahaman sumber daya manusia (SDM) terkait produksi gambir, terutama dalam konteks kualitas. Pendidikan dan pemahaman yang kurang dapat mempengaruhi kualitas gambir. Selain itu, harga yang ditetapkan oleh pemerintah ternyata lebih rendah daripada yang ditetapkan dalam Perbup, menunjukkan adanya ketidaksesuaian. Keterbatasan dana untuk bantuan teknologi menjadi hambatan dalam menyediakan alat pengolahan gambir kepada petani secara merata. Meskipun pemerintah berusaha mengatasi hambatan finansial, tantangan pola pikir petani dan peningkatan partisipasi dianggap kunci untuk mencapai perkembangan ekonomi yang berkelanjutan dalam sektor pertanian gambir. Dalam konteks ini, perubahan pola pikir petani menjadi fokus penting untuk mencapai perkembangan ekonomi yang berkelanjutan, walaupun pemerintah juga harus terus bekerja pada aspek finansial dan regulasi untuk menciptakan lingkungan yang mendukung baik petani maupun tengkulak.

## **5.2 Saran**

Adanya saran yang dapat penulis berikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pihak Pemerintah dan dinas diharapkan harus meningkatkan pengembangan peraturan perbub mengenai harga gambir dengan

memperhatikan pihak petani maupun tengkulak. Pemerintah juga terus giat dalam pengembangan Sumber Daya Manusianya secara optimal, karena dengan kemampuan SDM yang optimal dapat melakukan pengelolaan tanaman dengan baik dan benar, meningkatkan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian dan pihak dinas harus lebih bertanggung jawab terhadap tugas dan fungsinya sehingga dapat bekerja lebih optimal dimasa mendatang.

2. Pemerintah dan Dinas lebih memperhatikan berjalannya program yang telah ditetapkan dengan anggaran yang telah ditentukan dan menyediakan anggaran untuk berbagai program pelayanan yang sudah dikeluarkan serta tercermin bagaimana bentuk realisasi anggaran yang telah ditetapkan. Pihak dinas juga harus meningkatkan kerjasama dengan masyarakat untuk dapat mengembangkan peningkatan kualitas produksi gambir, dengan begitu akan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat petani gambir karena dapat membantu untuk menstabilkan harga jual gambir dan bisa menjaga perekonomian masyarakat petani gambir.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Adiwilaga, Anwas. (1992). *Ilmu Usaha Tani*. Cetakan II. Bandung: Alumni.
- Daniel, T. S. (2004). *Dasar-dasar Pemerintahan dan Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Dhalami. (2006). *Budidaya Gambir di Sumatera Barat*. Padang: Andalas University Press.
- Ekhtarina. (2008). *Ekonomi Mikro*. Jakarta: Salemba Empat.
- Harbani Pasolong. (2013). *Manajemen Pelayanan Publik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hardiyansyah. (2011). *Kualitas Pelayanan Publik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Keban, Y. T. (2008). *Pemikiran Administrasi Negara: Dari Classical hingga Postmodern*. Jakarta: Rajawali Press.
- Moleong, Lexi J. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, Deddy. (2018). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Cv. Alfabeta.
- Muliawati. (2022). *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Deepublish.
- Nawi, H. Rusdin. (2017). *Perilaku Kebijakan Organisasi*. Makasar. Cv Sah Media.
- Nawi, R. (2017). *"Pelayanan Publik"*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Oos M. Anwas. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*: Bandung. Alfabeta.
- Pasolong, H. (2010). *Administrasi Publik: Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rusdin Nawi. (2017). *Pengembangan Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Sahya, Anggara. (2014). *Kebijakan Publik*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Setianingrum, R. (2020). *Administrasi Publik dan Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Surbakti, A. (2014). *Budidaya Tanaman Gambir*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Syaukani, A. (2009). *Dasar-dasar Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

### **Skripsi:**

Evalisah, Yuni. (2020). *Responsivitas Pemerintah Daerah Dalam Ketahanan Pangan*. Lhokseumawe. Universitas Malikussaleh.

Manik, Suatik. (2013). *Analisis Dimensi Sosial dan Ekonomi Petani Gambir Kecamatan Pergetteng Getteng Sengkut Kabupaten Pakpak Bharat*. Medan. Universitas HKBP Nommensen Medan.

Muliawati, D. (2022). *Kinerja Pemerintah Desa Cijulang Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran*. Ciamis. Universitas Galuh.

Natalia, Nofriza, Widia. (2019). *Analisis Peningkatan Produktivitas Gambir Dalam Upaya Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat*. Padang. IAIN Bukit Tinggi.

Tinendung, Haidul. (2017). *Kehidupan Sosial Ekonomi Petani Gambir di Desa Tanjung Mulia Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat*. Medan. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

### **Jurnal:**

Akbar Afrizal (2018). Responsivitas Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Penanggulangan Wabah Demam Berdarah Dengue (DBD) Di Kota Pekanbaru Tahun 2015. *Jom Fisip*, 15, 01-10.

Atmaja, A. (2020). Strategi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Buruh di Kabupaten Kuantan Singing. *JUHAN PERAK 1*,

Alim, S. N. (2011). Peran Agribisnis Gambir dalam Peningkatan Pendapatan Petani. *Jurnal Pengembangan Agribisnis*, 1(2), 95-105.

Damanik, R. I. M., et al. (2014). Pemanfaatan Gambir (*Uncaria gambir* Roxb) sebagai Antioksidan Alamiah. *Jurnal Penelitian Hasil Hutan*, 32(1), 61-74.

Nim, Willy Brodus. (2017). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Kaliau Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5, 4.

Sukmawati, Dety.2016. Kebijakan Pemerintah Dalam Menangani Harga Cabai Merah Keriting di Sentra Produksi Kecamatan Cikajang Dan Pasar Induk Kramat Jati Jakarta. *Universitas Padjadjaran*.Volume IV No.2. Hal 2-4.

Setianingrum, T.(2020). Mempertanyakan Responsivitas Pelayanan Publik pada Pengelolaan Pengeaduan Kasus UPIK di Kota Yogyakarta.Populasi,24, no. 1. 1-25.

**Dokumen :**

Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: Depdiknas.

Peraturan Bupati Nomor 35 tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan yang berlaku pada tahun 2022 di Kabupaten Pakpak Bharat.

**Intenet:**

<https://jdih.pakpakhbaratkab.go.id>. Diases pada 06 januari 2023

[https://pakpakhbaratkab.bps.go.id/publication/2022/02/25/5c23dec3c6a7f538fadc\\_a702/kabupaten-pakpak-bharat-dalam-angka-2022.html](https://pakpakhbaratkab.bps.go.id/publication/2022/02/25/5c23dec3c6a7f538fadc_a702/kabupaten-pakpak-bharat-dalam-angka-2022.html). Diases pada 06 januari 2023.

## **Lampiran 1**

### **Pedoman Wawancara**

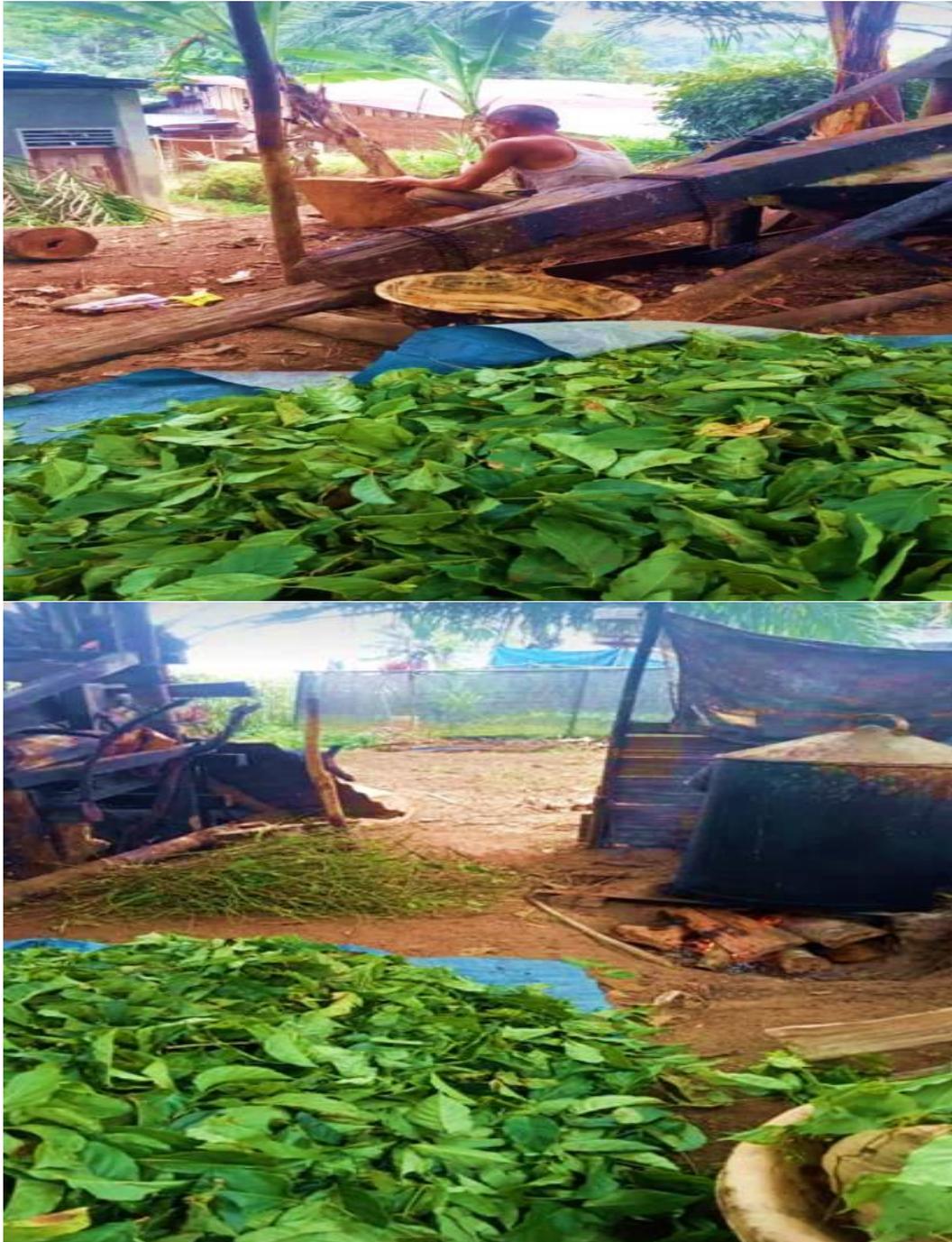
1. Bagaimana responsivitas dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pakpak Bharat dalam menstabilkan harga gambir Kabupaten Pakpak Bharat, khususnya di Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe ?
2. Apa harapan bapak/ibu terhadap Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat dalam meningkatkan pengelolaan gambir ?
3. Apa dampak yang dialami petani gambir dengan tidak stabilnya harga jual gambir ?
4. Apa saja bantuan yang pernah diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat kepada petani gambir ?
5. Apa saja faktor penghambat yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat dalam menstabilkan harga gambir ?
6. Apa saja upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat untuk menstabilkan kembali harga gambir ?
7. Bagaimana solusi untuk mengatasi ketidak stabilan harga gambir ?
8. Bagaimana kesiapan petani dalam menghadapi ketidakstabilan harga gambir ?
9. Bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai peran pemerintah/ responnya dalam mensejahterakan petani ?

**Lampiran 2**

**Foto Dokumentasi Wawancara**



**Gambar Gambir Kering**



Gambar Pemetikan dan Perebusan Daun Gambir



Wawancara dengan Petani Gambir



Wawancara dengan Pengepul Gambir



Wawancara dengan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian  
Kabupaten Pakpak Bharat



Wawancara dengan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah



Wawancara dengan Camat Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe

### Lampiran 3

#### Jadwal Penelitian

No	Uraian Kegiatan	Waktu Penelitian 2022/2023											
		Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jul	Ags	Okt	Des	
1	Pengajuan Judul												
2	Persiapan Proposal												
3	Bimbingan Proposal Skripsi												
4	Seminar Proposal												
5	Cetak Proposal Skripsi												
6	Bimbingan Skripsi												
7	Seminar Hasil												
8	Sidang Skripsi												

## RIWAYAT HIDUP PENULIS



- |                          |  |
|--------------------------|--|
| 1. Nama                  | : Mayulina Tinambun  |
| 2. Tempat/ Tanggal Lahir | : Lae Mbara, 24 Juli 2001  |
| 3. Jenis Kelamin         | : Perempuan  |
| 4. Kewarganegaraan       | : Indonesia  |
| 5. Agama                 | : Islam  |
| 6. Status                | : belum Kawin  |
| 7. NIM                   | : 190210072  |
| 8. Alamat                | : Dusun Lae Mbara Desa Perolihen Kecamatan<br>Sitellu Tali Urang Jehe Kabupaten Pakpak<br>Bharat Provinsi Sumatera Utara |

### Orang tua/ Wali

- |                     |  |
|---------------------|--|
| 1. Nama Ayah        | : Jonfri Tinambunan  |
| 2. Nama Ibu         | : Tati Banurea   |
| 3. Alamat Orang Tua | : Dusun Lae Mbara Desa Perolihen Kecamatan<br>Sitellu Tali Urang Jehe Kabupaten Pakpak<br>Bharat Provinsi Sumatera Utara |

### Riwayat Pendidikan

- |            |   |
|------------|---|
| 1. SD      | : SD N 034814 Nantimbo Stu Jehe                                 |
| 2. SMP     | : SMP N 5 Satu Atap Nantimbo Stu Jehe                           |
| 3. SMA/SMK | : SMK Negeri 1 Sitellu Tali Urang Jehe                          |
| 4. S-1     | : Program Studi Administrasi Publik Universitas<br>Malikussaleh |

Bukit Indah, 22 Januari 2024  
Penulis,

**Mayulina Tinambun**  
**NIM : 190210072**

